



# AGENDA RISET DAERAH 2015-2018

DEWAN RISET DAERAH  
JAWA BARAT  
2015

# **Kata Pengantar**

## **Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (BP3IPTEK) Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, telah dibentuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (BP3IPTEK) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang ditugaskan dalam rangka percepatan pembangunan Jawa Barat melalui implementasi manajemen pemerintah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaan analisis dan penelitian terkait isu pembangunan daerah, BP3IPTEK bekerjasama dengan Dewan Riset Daerah (DRD) yang dibentuk oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 071/Kep.941-BP3IPTEK/2015 tentang Pengangkatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan masa periode jabatan 2015-2018. DRD memiliki tugas pokok untuk membantu pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan strategis ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat serta memecahkan masalah – masalah aktual melalui penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyusun dan mengembangkan sistem basis data hasil penelitian di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya, DRD menyusun Agenda Riset Daerah (ARD) yang kemudian menjadi acuan kegiatan riset di Jawa Barat, termasuk menjadi acuan BP3IPTEK dalam melakukan kajian dan analisis. ARD untuk periode 2015-2018 mengangkat isu utama ketahanan pangan dan ketahanan sosial, dimana dengan ketersediaan pangan dan harga terjangkau melalui peningkatan produksi, akan meningkat terhadap ketahanan sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan percepatan pembangunan sesuai dengan yang tercantum pada sasaran RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Kepala BP3IPTEK  
Provinsi Jawa Barat

TTD

Dr. Ir. Lukman Shalahuddin, M.Sc

## **Kata Pengantar**

Dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya buku Agenda Riset Daerah – Jawa Barat ini berhasil disusun untuk kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan, baik Nasional maupun Jawa Barat pada khususnya, yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak dan institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

ARD ini disusun sebagai perwujudan dari salah satu tugas pokok Dewan Riset Daerah – Jawa Barat dalam membantu Pemerintah Daerah Jawa Barat pada pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir bathin sesuai dengan penancangan 10 common goals yang ingin dicapai. Adapun focus utama dari Agenda Riset ini adalah untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial.

Kami sangat menyadari bahwa mungkin ARD ini masih belum sempurna sekali dan ada beberapa kekurangannya, untuk itu segala koreksi dan usulan perbaikan kedepan akan diterima dengan segala senang hati. Demikian juga halnya kalau ada usulan menambah agenda penelitian untuk hal – hal yang bersifat mendesak (crash program), baik dari pemerintah melalui pendekatan top-down maupun dari masyarakat melalui pendekatan bottom-up.

Akhirnya, tidak lupa kami haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan ARD ini, semoga upaya kita semua itu dapat bermanfaat bagi semua masyarakat Jawa Barat.

Ketua Dewan Riset Daerah – Jawa Barat

TTD

Ir. Rudy Hermawan Karsaman MSc., PhD.

# Daftar Isi

## Kata Pengantar

## Daftar Isi

<b>Bab I. Perencanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Pembangunan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Permasalahan Pembangunan .....	1
1.1.1. Bidang Pendidikan .....	1
1.1.2. Bidang Kesehatan .....	1
1.1.3. Bidang Lingkungan Hidup.....	2
1.1.4. Bidang Pekerjaan Umum .....	3
1.1.5. Bidang Penataan Ruang .....	3
1.1.6. Bidang Perencanaan Pembangunan .....	4
1.1.7. Bidang Perumahan .....	4
1.1.8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	4
1.1.9. Bidang Penanaman Modal .....	4
1.1.10. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .....	4
1.1.11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil .....	5
1.1.12. Bidang Ketenagakerjaan .....	5
1.1.13. Bidang Ketahanan Pangan .....	5
1.1.14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	5
1.1.15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	5
1.1.16. Bidang Perhubungan .....	6
1.1.17. Bidang Komunikasi dan Informatika .....	6
1.1.18. Bidang Pertanahan .....	6
1.1.19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	6
1.1.20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian .....	7
1.1.21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	7
1.1.22. Bidang Sosial .....	7
1.1.23. Bidang Kebudayaan .....	8
1.1.24. Bidang Statistik.....	8

1.1.25. Bidang Kearsipan .....	8
1.1.26. Bidang Perpustakaan.....	8
1.1.27. Bidang Kelautan dan Perikanan.....	8
1.1.28. Bidang Pertanian .....	9
1.1.29. Bidang Kehutanan.....	9
1.1.30. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	9
1.1.31. Bidang Pariwisata .....	10
1.1.32. Bidang Perindustrian.....	10
1.1.33. Bidang Perdagangan .....	10
1.1.34. Bidang Ketransmigrasian .....	10
1.2. Isu Strategis.....	11
1.3. Perencanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	11
1.3.1. Kegiatan Prioritas (2013-2018) Tematik Sektorial berdasarkan 10 Common Goals .....	12
1.3.2. Kegiatan prioritas (2013-2018) Tematik Kewilayahan Jawa Barat.....	15
1.4. Faktor Pendukung Keberhasilan .....	16
1.5. Semangat Pembangunan IPTEK.....	19
1.5.1. Ketahanan Pangan.....	20
1.5.2. Ketahanan Sosial.....	20
<b>Bab II. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sistem Inovasi Daerah ....</b>	<b>23</b>
2.1. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK.....	23
2.2. Sistem Inovasi Daerah .....	24
<b>Bab III. Agenda Riset Daerah .....</b>	<b>26</b>
3.1. Bidang Pendidikan.....	26
3.1.1. Latar Belakang.....	26
3.1.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	29
3.1.3. Tema Riset.....	32
3.1.4. Tema Riset Unggulan .....	32
3.2. Bidang Kesehatan .....	35
3.2.1. Latar Belakang.....	35
3.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	36

3.2.3. Tema Riset.....	39
3.2.4. Tema Riset Unggulan .....	39
3.3. Bidang Infrastruktur Wilayah dan Air Baku .....	40
3.3.1. Bidang Infrastruktur Wilayah.....	40
3.3.1.1. Latar Belakang.....	40
3.3.1.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	41
3.3.1.3. Tema Riset.....	42
3.3.1.4. Tema Riset Unggulan .....	42
3.3.2. Bidang Energi.....	43
3.3.2.1. Latar Belakang.....	43
3.3.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	44
3.3.2.3. Tema Riset.....	44
3.3.2.4. Tema Riset Unggulan .....	45
3.3.2. Bidang Air Baku .....	46
3.3.3.1. Latar Belakang.....	46
3.3.3.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	47
3.3.3.3. Tema Riset.....	53
3.3.3.4. Tema Riset Unggulan .....	53
3.4. Bidang Ekonomi Pertanian.....	55
3.4.1. Latar Belakang.....	55
3.4.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Ulama.....	57
3.4.3. Tema Riset.....	61
3.4.4. Tema Tema Riset Unggulan .....	61
3.5. Bidang Ekonomi Non Pertanian .....	64
3.5.1. Latar Belakang.....	64
3.5.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	66
3.5.3. Tema Riset.....	67
3.5.4. Tema Tema Riset Unggulan .....	68
3.6. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan .....	69
3.6.1. Latar Belakang.....	69
3.6.1.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	71
3.6.2. Tema Riset.....	75

3.6.3. Tema Riset Unggulan .....	76
3.7. Bidang Seni Budaya .....	78
3.7.1. Latar Belakang.....	78
3.7.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	79
3.7.3. Tema Riset.....	80
3.7.4. Tema Riset Unggulan .....	80
3.8. Bidang Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Keamanan .....	83
3.8.1. Bidang Kesejahteraan Sosial .....	83
3.8.1.1. Latar Belakang.....	83
3.8.1.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	86
3.8.1.3. Tema Riset.....	90
3.8.1.4. Tema Riset Unggulan .....	92
3.9.2. Bidang Keamanan.....	94
3.9.2.1. Latar Belakang.....	94
3.9.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	97
3.9.2.3. Tema Riset.....	99
3.10. Pemerintahan .....	99
3.10.1 Latar Belakang.....	99
3.10.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama.....	101
3.10.3. Tema Riset.....	108
3.10.4. Tema Riset Unggulan .....	108

# **Bab I**

## **Perencanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Pembangunan**

### **1.1. Permasalahan Pembangunan**

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2008-2013 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

#### **1.1.1. Bidang Pendidikan**

Permasalahan utama di Bidang Pendidikan adalah :

- 1) Putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang didominasi anak usia 16 – 18 tahun;
- 2) Anak usia sekolah yang bekerja;
- 3) Aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah;
- 4) Ruang kelas untuk siswa SMP dan SMA di beberapa wilayah masih terbatas dan rusak serta ruang lainnya (laboratorium, perpustakaan);
- 5) Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing;
- 6) Biaya pendidikan menengah dan tinggi mahal.

#### **1.1.2. Bidang Kesehatan**

Permasalahan utama di Bidang Kesehatan adalah :

- 1) Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat dan terjadi penyebaran beberapa penyakit menular (*multiple burden of disease*) di luar sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (*new emerging* dan *re-emerging*) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan lingkungan;



- 2) Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berdasarkan jumlah sarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di kabupaten/kota;
- 3) Sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif dan preventif, hal ini terlihat dari proporsi anggaran lebih tinggi untuk kuratif;
- 4) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat,
- 5) Belum terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standar dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang prima;
- 6) Belum optimalnya aspek regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan.

### **1.1.3. Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama di Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Masih tingginya pencemaran lingkungan; Jawa Barat sebagai daerah dengan perkembangan industri yang termasuk terbesar di Indonesia memiliki banyak industri - industri baik yang berada pada kawasan khusus industri maupun kawasan yang bukan diperuntukan khusus untuk industri. Sebagian besar pula keberadaan industri tersebut berdekatan dengan badan-badan air terutama sungai-sungai besar di Jawa Barat. Kondisi sungai-sungai tersebut saat ini sudah tercemar dan bisa berdampak pada kualitas lingkungan hidup.
- 2) Belum tercapainya fungsi kawasan lindung secara optimal; Kawasan lindung berupa hutan, kawasan hijau termasuk Daerah Alir Sungai juga sudah terancam jumlah dan fungsinya.
- 3) Masih tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Banyaknya industri, ataupun aktifitas yang masih mengemisikan GRK dan belum terkontrol dengan baik.
- 4) Masih adanya konflik pemanfaatan ruang; Pemanfaatan ruang untuk berbagai peruntukan masih ada yang tidak berpihak kepada keberlangsungan kualitas lingkungan hidup yang baik.

- 5) Kerusakan ekosistem mangrove dan kawasan pesisir. Kerusakan ini selain akibat adanya aktifitas ekonomi didaerah pesisir, juga terkait dengan pencemaran sungai yang bermuara di kawasan pesisir, terutama pesisir utara.

#### **1.1.4. Bidang Pekerjaan Umum**

Permasalahan utama pada aspek kebinamargaan adalah:

- 1) Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur;
- 2) Belum terpenuhinya standar lebar jalan pada sebagian besar jalan provinsi.

Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah:

- 1) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi;
- 2) Tingginya kerusakan jaringan irigasi;
- 3) Menurunnya daya tampung sungai.

Permasalahan utama pada aspek keciptakarya adalah:

- 1) Rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum
- 2) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, drainase);
- 3) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional.

#### **1.1.5. Bidang Penataan Ruang**

Permasalahan utama di Bidang Penataan Ruang adalah :

- 1) Belum memadainya pranata Bidang Penataan Ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
- 2) Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan;
- 3) Menurunnya ketersediaan ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
- 4) Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi;
- 5) Belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat – pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

### **1.1.6. Bidang Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan utama di Bidang Perencanaan Pembangunan adalah :

- 1) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal;
- 2) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah.

### **1.1.7. Bidang Perumahan**

Permasalahan utama adalah rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin dan buruh serta tingginya *backlog* (tidak seimbang) kebutuhan dan penyediaan rumah sebanyak 1,3 juta.

### **1.1.8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan utama di Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah :

- 1) Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga baik berskala nasional maupun internasional;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri;
- 3) Rendahnya mental juara.

### **1.1.9. Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan utama di Bidang Penanaman Modal adalah :

- 1) Biaya ekonomi tinggi, kepastian hukum dan jaminan keamanan berusaha;
- 2) Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata;
- 3) Konflik dalam hubungan industrial.

### **1.1.10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan utama di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- 1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
- 2) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan;

- 3) Daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor;
- 4) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.

#### **1.1.11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Penduduk migran belum terdokumentasikan secara baik;
- 2) Pengendalian penduduk belum optimal.

#### **1.1.12. Bidang Ketenagakerjaan**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Kualitas tenaga kerja masih rendah;
- 2) Persebaran tenaga kerja yang tidak merata;
- 3) Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah.

#### **1.1.13. Bidang Ketahanan Pangan**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 2) Tingginya ketergantungan impor pangan strategis;
- 3) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas;
- 4) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

#### **1.1.14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Kesetaraan gender;
- 2) Masih rentan permasalahan *trafficking* dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **1.1.15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Kurangnya tenaga penyuluh KB;
- 2) Kualitas pelayanan belum maksimal sehingga Intensifikasi Pelayanan KB sangat penting;
- 3) Belum optimalnya ketahanan keluarga;
- 4) Masih kuranya kesadaran masyarakat untuk ber-KB.

#### **1.1.16. Bidang Perhubungan**

Permasalahan utama bidang perhubungan adalah :

- 1) Belum berkembangnya sistem transportasi masal dan integrasi antar moda angkutan;
- 2) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya *overloading* angkutan barang;
- 3) Belum memadainya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang baik domestik maupun internasional;
- 4) Belum tersedianya pelabuhan laut internasional dan belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.

#### **1.1.17. Bidang Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan utama adalah:

- 1) Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
- 2) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

#### **1.1.18. Bidang Pertanahan**

Permasalahan utama adalah:

- 1) Banyaknya tanah belum bersertifikat,
- 2) Penyelesaian tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain.

#### **1.1.19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Permasalahan utama adalah:

- 1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
- 2) Krisis kepercayaan terhadap pemerintah;

- 3) Harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun;
- 4) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### **1.1.20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- 2) Penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
- 3) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
- 4) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- 5) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
- 6) Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas;
- 7) Belum tuntasnya batas administrasi Daerah;
- 8) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat;
- 9) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran.

#### **1.1.21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan utama adalah:

- 1) Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
- 2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur Desa;
- 3) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.

#### **1.1.22. Bidang Sosial**

Permasalahan utama adalah:

- 1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- 2) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan;
- 3) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- 4) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### **1.1.23. Bidang Kebudayaan**

Permasalahan utama adalah:

- 1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
- 2) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
- 3) Masih rendahnya promosi budaya lokal Jawa barat di dalam dan luar negeri.

#### **1.1.24. Bidang Statistik**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik;
- 2) Referensi data pembangunan yang berbeda-beda.

#### **1.1.25. Bidang Kearsipan**

Permasalahan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan.

#### **1.1.26. Bidang Perpustakaan**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana;
- 2) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;

#### **1.1.27. Bidang Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Keterbatasan tenaga penyuluh;
- 2) Kualitas sumberdaya manusia masih rendah;
- 3) Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran;
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap.

### **1.1.28. Bidang Pertanian**

Permasalahan utama adalah:

- 1) Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi daging sapi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan rumah tangga dan industri pengolahan;
- 2) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;
- 3) Rusaknya kondisi infrastruktur jalan, kesuburan lahan dan irigasi ke sentra produksi;
- 4) Tingginya konversi lahan pertanian dan tidak jelasnya status lahan HGU di Jabar Selatan;
- 5) Rendahnya perlindungan terhadap petani produsen;
- 6) Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas;
- 7) Masih tingginya impor bahan pangan (daging, beras, dan hortikultura);
- 8) Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian.

### **1.1.29. Bidang Kehutanan**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan lindung;
- 3) Belum optimalnya konservasi hutan dan lahan;
- 4) Rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar kehutanan.

### **1.1.30. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan utama adalah

- 1) Belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah;
- 2) Terbatasnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral;
- 3) Belum optimalnya pendayagunaan produksi energi sumber daya mineral;
- 4) Belum optimalnya penanganan dan mitigasi bencana alam geologi.



### **1.1.31. Bidang Pariwisata**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing
- 2) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan multistakeholders (sesuai UU 10/2013);
- 3) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan;
- 4) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.

### **1.1.32. Bidang Perindustrian**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Pemanfaatan bahan baku lokal rendah;
- 2) Inovasi produk masih rendah;
- 3) SDM masih rendah;
- 4) Penguasaan teknologi rendah;
- 5) Kurangnya produktivitas bahan baku substitusi impor.

### **1.1.33. Bidang Perdagangan**

Permasalahan utama adalah:

- 1) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor;
- 2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi;
- 3) Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM;
- 4) Berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi;
- 5) Kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.

### **1.1.34. Bidang Ketransmigrasian**

Permasalahan utama adalah :

- 1) Kesiapan tempat transmigran tidak sesuai dengan yang diharapkan;
- 2) Kesiapan sumber daya manusia yang dikirim menjadi transmigran.

## 1.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis
6. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya *Jabar Green Province*.
7. Kualitas demokrasi
8. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana
9. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya local
11. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat
12. Penanggulangan penduduk miskin.
13. Pasar global dan *Asean – China Free Trade Area (ACFTA)*
14. Masyarakat Ekonomi ASEAN
15. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
16. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)
17. Ketahanan Pangan
18. Keamanan dan ketertiban daerah

## 1.3. Perencanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Skema pelaksanaan kegiatan pembangunan di Jawa Barat diimplementasikan melalui skenario pembangunan *Common Goals* berbasis tematik sektoral yang dilaksanakan oleh OPD/Biro dengan skema kegiatan kewilayahan berbasis Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP).

Adapun 10 *common goals* yang menjadi rujukan :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan
3. Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku
4. Ekonomi Pertanian
5. Ekonomi Non Pertanian
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
7. Pengelolaan Seni, Budaya, Wisata serta Kepemudaan
8. Ketahanan Keluarga dan Kependudukan
9. Kemiskinan, PMKS dan Keamanan
10. Tata Kelola Pemerintahan

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan membawa manfaat luar biasa bagi peradaban kehidupan manusia. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada dan diyakini akan meningkatkan kesehatan, kebahagiaan dan imortalitas manusia. Pencapaian target kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dari 10 *Common Goals* yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Biro dapat dilakukan percepatan melalui penerapan Iptek sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

Penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek pada kegiatan prioritas 2013 – 2018 tematik sektoral segera harus dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan, sumberdaya manusia, dukungan sarana dan prasarana serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian, Masyarakat dan Industri. Disadari atas keterbatasan tersebut maka perlu dilakukan prioritas kegiatan yang akan diinvensikan Iptek melalui arahan riset didalam Agenda Riset Daerah ini.

### **1.3.1. Kegiatan Prioritas (2013-2018) Tematik Sektoral berdasarkan 10 Common Goals :**

CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

1. Jabar bebas putus jenjang sekolah
2. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas
3. Pendidikan berkebutuhan khusus

4. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi
5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik

#### CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan
2. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak
3. Peningkatan layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa

#### CG3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku

1. Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya
2. Infrastruktur strategis di koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan
3. Infrastruktur jalan dan perhubungan
4. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis
5. Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan
6. Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic
7. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat

#### CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian

1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional
2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry
3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani
4. Jawa Barat bebas rawan pangan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan

#### CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian

1. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM
2. Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi
3. Pengembangan skema pembiayaan alternative
4. Pengembangan industry manufaktur
5. Pengembangan industry kreatif dan wirausahawan muda kreatif

#### CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan

1. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral
2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%
3. Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional
4. Penanganan bencana longsor dan banjir

#### CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga

1. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan
2. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat
3. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat
4. Pengembangan destinasi wisata

#### CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
3. Peningkatan pengelolaan kependudukan

#### CG 9 Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan

1. Pengurangan kemiskinan

2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS
3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat

#### CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan

1. Efektivitas pemerintahan dan profesionalisme aparatur
2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik
3. Penataan system hukum dan penegakan hukum
4. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak
5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan asset dan keuangan; dan
6. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dan desa

### **1.3.2. Kegiatan prioritas (2013-2018) Tematik Kewilayahan Jawa Barat**

#### WKPP I (Wilayah Bogor)

1. Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas local
2. Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global
3. Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya
4. Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhan ratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas

Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR

#### WKPP II Wilayah Purwakarta

1. Pengembangan industri manufaktur
2. Pengembangan industri keramik dan gerabah

3. Pengembangan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal
4. Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah)
5. Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR

#### WKPP III Wilayah Cirebon

1. Pengembangan industri manga gedong gincu dan industrialisasi perikanan
2. Pengembangan system perdagangan komoditi beras dan palawija
3. Pengembangan industry batik dan rotan, serta industry makanan olahan berbahan baku loka
4. Pelestarian keratin, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata
5. Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati

#### WKPP IV (Wilayah Priangan)

1. Pengembangan kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor
2. Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak
3. Pengembangan produksi tanaman industry (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor
4. Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata
5. Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (*growth center* Pangandaran dan Rancabuaya).

### 1.4. Faktor Pendukung Keberhasilan

Jawa Barat mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1.1. SWOT Ekonomi Jawa Barat Tahun 2014-2016**

VARIABEL	SUB VARIABEL
KEKUATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penduduk dan tingginya kunjungan penduduk luar wilayah merupakan potensi pasar</li> <li>2. Minat perusahaan yang akan melakukan investasi di Jabar tinggi (info BKPPMD Jabar)</li> <li>3. Ekspektasi positif pelaku usaha dan konsumen positif terhadap perekonomian Jabar kedepan (survei BI)</li> <li>4. Permintaan akan meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan</li> <li>5. Infrastruktur meningkat (kualitas dan kuantitas) Kredit meningkat</li> <li>6. Jumlah penduduk dan tingginya kunjungan penduduk luar wilayah merupakan potensi pasar</li> <li>7. Minat perusahaan yang akan melakukan investasi di Jabar tinggi (info BKPPMD Jabar)</li> <li>8. Ekspektasi positif pelaku usaha dan konsumen positif terhadap perekonomian Jabar kedepan (survei BI)</li> <li>9. Permintaan akan meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan</li> <li>10. Infrastruktur meningkat (kualitas dan kuantitas) Kredit meningkat</li> </ol>
KELEMAHAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik dalam penetapan UMK yang mempengaruhi produksi</li> <li>2. Perubahan cuaca akan berdampak pada produksi</li> <li>3. Potensi dampak lanjutan perubahan harga-harga yang diatur pemerintah terhadap ongkos produksi dan volume produksi</li> <li>4. Adanya ketimpangan yang cukup besar pada PDRB antar Kabupaten/Kota di JawaBarat.</li> <li>5. Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan menurun tetapi pada beberapa tahun ke depan diperkirakan masih relative besar, sehingga program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih menjadi prioritas.</li> </ol>

VARIABEL	SUB VARIABEL
PELUANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai pulihnya permintaan ekspor Eropa dan Amerika</li> <li>2. Ekspansi fiskal pemerintah pusat dan daerah berdampak positif terhadap sektor usaha</li> <li>3. Stabilitas politik yang terjaga berdampak terhadap stabilitas ekonomi</li> </ol>



TANTANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga</li> <li>2. Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi</li> <li>3. Peningkatan target indeks daya beli masyarakat Jawa Barat Tahun 2014, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut</li> <li>4. Tantangan perubahan iklim dan out break hama penyakit, dikhawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa Tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan melalui perbaikan system perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitas sarana produksi</li> <li>5. Kelangkaan energi pada beberapa tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energy alternative</li> <li>6. Terjadinya penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di Pasar Global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat</li> <li>7. Di bidang teknologi, peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relative rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat</li> <li>8. Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri</li> <li>9. Penciptaan keterkaitan industri pengolah dengan sumber daya lokal</li> </ol>
-----------	---

*Sumber : Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat, 2014.*

Dari potensi SDM, Jawa Barat memiliki lembaga akademisi yang cukup banyak, tidak kurang dari 367 Perguruan Tinggi negeri dan swasta yang ada di Jawa Barat, serta sekitar 75 Lembaga Litbang berbagai kementerian dan swasta yang berdomisili di Jawa Barat. Keberadaan lembaga akademisi tersebut, merupakan potensi tersediri dalam pengembangan Iptek di Jawa Barat. Selain itu Masyarakat Jawa Barat cukup dikenal mempunyai kreativitas tinggi dan inovatif, sehingga sudah banyak inovasi-inovasi pada berbagai bidang yang telah dihasilkan atas kreativitas masyarakat. Namun demikian keberadaan lembaga akademisi tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam pemecahan permasalahan pembangunan Jawa Barat. Salah satunya disebabkan belum optimalnya fasilitasi pemerintah dalam membangun jejaring kerjasama keterlibatan lembaga akademisi dalam pemecahan permasalahan pembangunan Jawa Barat.

BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat didirikan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat melalui implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi

serta pengembangan inovasi agar mempunyai daya saing yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

### **1.5. Semangat Pembangunan IPTEK**

Pentingnya penciptaan ketahanan pangan sebagai wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi. Pemenuhan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh seluruh rumah tangga merupakan sasaran utama dalam pembangunan ekonomi. Jadi kuncinya adalah ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pengadaannya. Ketersediaan berkaitan dengan aspek produksi dan suplai, keterjangkauan merupakan aspek akses baik secara ekonomi maupun keamanan, sedangkan stabilitas merupakan aspek distribusi.

Permintaan pangan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, mendorong percepatan produksi pangan dalam rangka terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, sehingga ketahanan pangan sangat terkait dengan kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilisasi penyediaan pangan serta daya dukung sektor pertanian.

Namun kepadatan penduduk yang diperkuat dengan penyusutan areal tanam, khususnya penurunan luas lahan pertanian produktif akibat konversi lahan untuk kepentingan sektor non-pertanian, serta kecilnya margin usaha tani yang berkonsekuensi pada rendahnya motivasi petani untuk meningkatkan produksi, serta adanya kendala dalam distribusi pangan sebagai akibat keterbatasan jangkauan jaringan sistem transportasi, ketidaktersediaan produk pangan sebagai akibat lemahnya teknologi pengawetan pangan, diperkuat lagi dengan kakunya (*rigid*) pola konsumsi pangan sehingga menghambat upaya pencapaian kemandirian/ketahanan pangan. Kondisi yang demikian tersebut makin memperpanjang fenomena kemiskinan dan ketahanan pangan yang dihadapi.

Ketahanan sosial merupakan kemampuan komunitas (*local/ grassroot community*) dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat tetap dapat koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 1.5.1. Ketahanan Pangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan agar Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 dan 2016 tetap di atas nasional. Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan.
2. Memantapkan pertumbuhan sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor jasa-jasa dan sektor bangunan
3. Integrasi janji gubernur dengan implementasi tematik sektoral dan kewilayahan
4. Penguatan kelembagaan investasi dan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan kebijakan khusus terkait penurunan pengangguran, yakni melalui *Common Goals 5* ‘Meningkatkan Ekonomi Pertanian’ dengan kegiatan tematik peningkatan budaya masyarakat bekerja, Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha UMKM.

### 1.5.2. Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial (*social resilience*) dirumuskan sebagai kemampuan suatu masyarakat atau komunitas untuk memulihkan diri secara cepat dari sebuah bencana dasyat yang mengancam keberadaannya (*existence*), baik yang berasal dari dalam (*internal factors*) maupun dari luar (*external factors*). Kemampuan tersebut terutama meliputi kemampuan untuk mengantisipasi risiko, menetralisasi dampak dari segala kekurangan dan keterbatasan (*scarcity*), menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan (*adaptability*), kemampuan untuk melakukan perubahan (*evolution*) dan kemampuan untuk tetap tumbuh dan berkembang (*growth*). *Community and Regional Resilience Institute* (CARRI), setelah melakukan review terhadap 47 rumusan yang digunakan oleh berbagai penulis dari mulai tahun 1973 sampai dengan tahun 2009 menyimpulkan, bahwa “...community resilience is the capacity to anticipate risk, limit impact, and bounce back rapidly through survival, adaptability, evolution, and growth in the face of turbulent change.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> CARRI (Community and Regional Resilience Institute). 2013. *Definitions of Community Resilience: An Analysis. A CARRI Report*. p.10.

Lebih lanjut CARRI menegaskan empat hal berkaitan dengan definisi di atas. *Pertama*, ketahanan adalah atribut yang melekat dan sekaligus dinamis dari sebuah masyarakat atau komunitas. *Kedua*, kemampuan menyesuaikan diri adalah inti dari ketahanan sosial. *Ketiga*, setiap penyesuaian yang dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. *Keempat*, ketahanan sosial harus memungkinkan sebuah masyarakat atau komunitas memprediksi kemampuannya untuk pulih dari malapetaka. Hal ini berarti sebuah masyarakat atau komunitas mampu mengkaji ketahanan sosialnya serta mengambil tindakan untuk meningkatkannya jika dianggap perlu.<sup>2</sup> Pengertian ketahanan sosial dari perspektif ekologi diwakili oleh rumusan Adger yang menyatakan, bahwa ketahanan sosial adalah “.....”*the ability of groups or communities to cope with external stresses and disturbances as a result of social, political, and environmental change.*”<sup>3</sup>

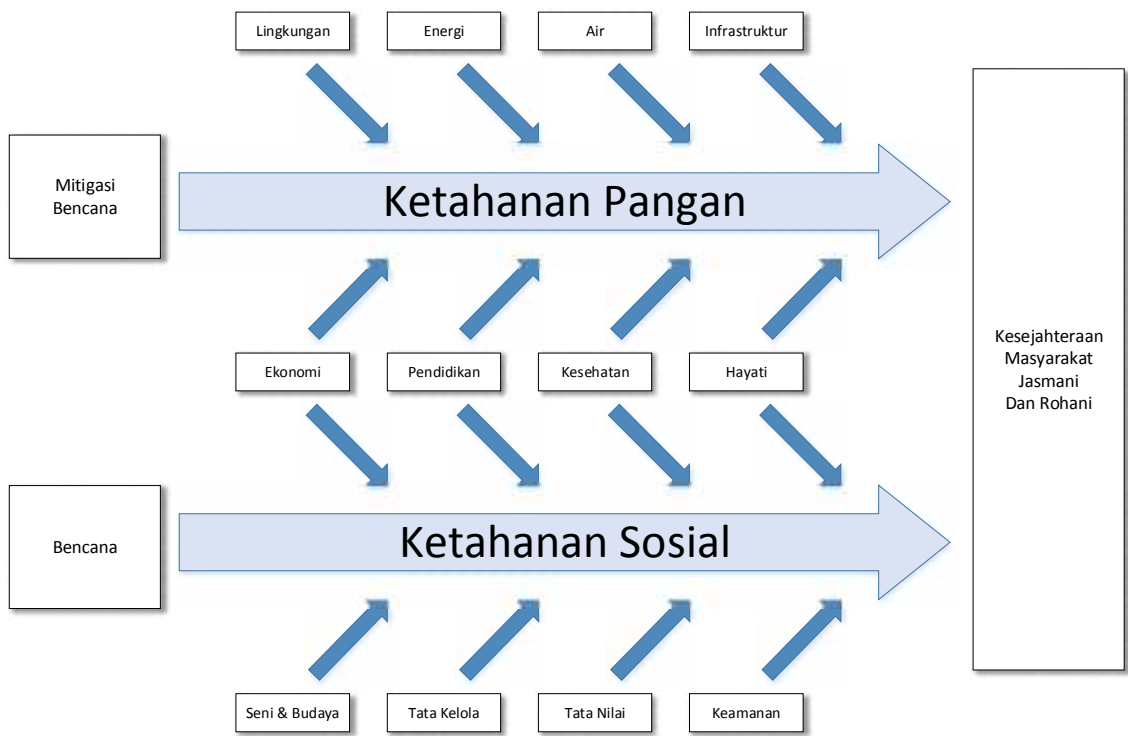
Sehingga identifikasi variabel-variabel yang esensial untuk mendapat perhatian dalam memahami, mengidentifikasi, memelihara serta meningkatkan ketahanan masyarakat Jawa Barat sebagai modal sosial menjadi hal yang sangat penting. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Pemahaman dan identifikasi identitas dan budaya masyarakat Jawa Barat yang merupakan kerangka normatif masyarakat.
2. Pemahaman dan identifikasi insentif struktur yang ada dalam struktur sosial masyarakat Jawa Barat yang mewujudkan nyata dalam regulasi-regulasi pemerintah yang efektif dan inovatif.
3. Pemahaman dan identifikasi institusi-institusi sosial dasar yang menjadi tulang punggung ketahanan masyarakat, khususnya agama, keluarga, dan pendidikan.
4. Pemahaman dan identifikasi perubahan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan-perubahan sosial budaya masyarakat.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Adger, W. 2000. “Social and ecological resilience: Are they related?” *Progress in Humangeography*. P.347



**Gambar 1.1.** Bagan Keterkaitan antar Bidang

## Bab II

# Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sistem Inovasi Daerah

### 2.1. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK

Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, selain itu dinamika lingkungan regional, nasional serta global bergerak dengan dinamis, hal ini akan membawa konsekuensi kepada permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Beberapa permasalahan dalam pembangunan Jawa Barat yang terkait dengan IPTEK, antara lain:

- (1) Kebijakan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK, kebijakan penerapan dan perkembangan perlu diarahkan untuk mencari pemecahan masalah besar yang masih harus dihadapi dalam pembangunan jangka panjang,
- (2) Sektor produksi, kegiatan produksi di Jawa Barat baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan.
- (3) Ragam kegiatan penelitian dan pengembangannya.
- (4) Kemitraan antara industri dan dunia usaha dengan lembaga litbang masih lemah.

Selain permasalahan tersebut terdapat juga tantangan yang harus dihadapi terkait dengan pembangunan IPTEK di Jawa Barat. Tantangan tersebut muncul meliputi beberapa aspek antara lain aspek lingkungan global, aspek kemajuan iptek inovasi, aspek perkembangan ekonomi yang meliputi pengetahuan ekonomi dan jaringan ekonomi, serta tantangan yang timbul dari faktor-faktor lokalitas sendiri.

Untuk menghadapi hal tersebut, paradigma pembangunan kelitbang di Jawa Barat telah bergeser dari *riset and development* menjadi *riset for development*, perubahan paradigma tersebut dilakukan untuk memberi penekanan agar terjadi optimalisasi pemanfaatan hasil litbang untuk pembangunan.

Pokok-pokok kebijakan untuk mengembangkan nilai-nilai dan budaya IPTEK di masyarakat, sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan nilai-nilai IPTEK dan membentuk budaya IPTEK di masyarakat
- (2) Mendorong kemitraan riset

- (3) Mempercepat upaya manufaktur progresif
- (4) Meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasaan IPTEK
- (5) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia IPTEK
- (6) Mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan IPTEK.

Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat telah dituangkan dalam Misi 1 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 : **“Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**. Misi ini bertujuan untuk membangun Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.

## **2.2. Sistem Inovasi Daerah**

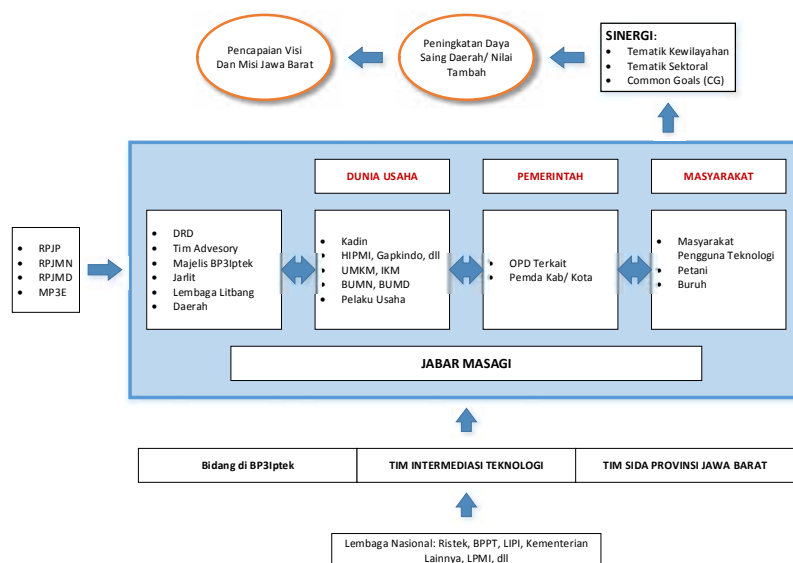
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Barat diarahkan kepada penguatan inovasi pada kegiatan tematik sektoral dan kegiatan tematik kewilayahan, yang merupakan kebijakan prioritas pembangunan Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018 serta RKPD Jawa Barat.

### **Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Provinsi Tentang Sistem Inovasi Daerah Terhadap Penyelesaian Pembangunan Daerah**

- (1) Bersinergi dengan pemerintah dalam dukungan sukses implementasi program program nasional di Jawa Barat, yang tercantum didalam, Metropolitan Priority Area, kesiapan daerah menghadapi, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai Tahun 2015, Pendidikan Menengah Universal 12 tahun, Program Pengurangan Kemiskinan, dan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- (2) Bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui berbagi peran dalam skema bantuan keuangan untuk melakukan upaya khusus dalam pencapaian IPM Jawa Barat berbasis Kabupaten/Kota, mewujudkan Kawasan Lindung 45% sebagai bagian dari strategi Jabar *Green Province*, meningkatkan kualitas tingkat pelayanan infrastruktur dasar (kemantapan jalan, jaringan irigasi, rasio elektrifikasi rumah tangga, pemenuhan air bersih, pengelolaan sampah, dan pengendalian limbah industri), pengurangan kemiskinan dan pengangguran

berbasis individu secara serentak dan bersinergi multi pihak, modernisasi layanan investasi, serta meningkatkan program pelayanan dan kemandirian bagi Masyarakat Lanjut Usia;

- (3) Sinergi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha dalam integrasi pelayanan dasar masyarakat khususnya pendidikan dan kesehatan di kawasan industri, mendorong pelibatan dunia usaha dalam pembangunan strategis dan monumental melalui skema RAM-IP (Rencana Aksi Multipihak – Implementasi Pekerjaan);
- (4) Kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antarprovinsi dan antar kabupaten/kota berbasis desa/kecamatan dengan prinsip kesetaraan pembangunan;
- (5) Perwujudan Komitmen Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu Pembangunan Tematik Kewilayahan berbasis WKPP-I sampai dengan WKPP-IV, sebagai kegiatan pembangunan unggulan dan menjadi ikon kewilayahan pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan dan didanai bersama kabupaten/kota melalui mekanisme seleksi dan sharing pendanaan multipihak;
- (6) Mengembangkan skema baru penanganan dan pendanaan pembangunan infrastruktur strategis melalui kerjasama *Business to Business* (B to B) antara lain dalam pembangunan monorel Bandung Raya dan jalan TOL;
- (7) Peningkatan akuntabilitas dan efektivitas peruntukan Bansos dan Hibah agar tepat sasaran program dan tepat penerima manfaat.



**Gambar 2.1.** Skema Penguatan SIDA di Jawa Bar



## Bab III

### Agenda Riset Daerah

#### 3.1. Bidang Pendidikan

##### 3.1.1. Latar Belakang

Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dalam hal akses terhadap pendidikan. Angka partisipasi kasar telah meningkat pada semua tingkat pendidikan selama dekade terakhir ini. Secara nasional, antara tahun 2002 hingga 2012, angka partisipasi kasar untuk pendidikan dasar relatif stabil. Sebaliknya, angka partisipasi kasar untuk SMP telah meningkat dari 77% menjadi 90%, SMA dari 45% menjadi 68%, dan perguruan tinggi dari 13% menjadi 26%. Pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi menjadi sub-sektor dengan pertumbuhan tercepat selama dekade terakhir ini. Nampak jelas bahwa masyarakat Indonesia, termasuk penduduk termiskin, membutuhkan layanan pendidikan pasca-pendidikan dasar yang lebih banyak dan lebih baik. Tujuan pemerintah untuk meningkatkan sejalan dengan peningkatan permintaan ini (BAPPENAS A, 2014).

Jawa Barat masih menghadapi permasalahan pokok yang berkaitan dengan empat pilar utama kebijakan strategis pembangunan pendidikan, yaitu (1) *Pemerataan dan Keadilan Pendidikan* bagi semua warga dan masyarakat tanpa kecuali; (2) *Mutu dan Keunggulan Pendidikan* Jawa Barat untuk memberikan kontribusi dalam memacu daya saing Jawa Barat di era global; (3) *Pendidikan* untuk pemenuhan kebutuhan lapangan dalam rangka meningkatkan produktivitas dunia usaha dan industri; dan (4) peningkatan **tata kelola** yang baik dan akuntabel dalam pembangunan pendidikan di Jawa Barat.

#### 1. Upaya mewujudkan layanan yang merata dan berkeadilan

Jawa Barat masih belum dapat menyelesaikan permasalahan akses terhadap pendidikan, terutama untuk jenjang SMP dan SMA/SMK. Data tahun 2014, APK untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan PT berturut-turut adalah 106.98, 87.50, 68.55, dan 21.70 (BPS Jawa Barat A, 2015). Data ini menunjukkan bahwa untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dan target APK SM 100% diperlukan berbagai upaya dan program

yang efektif. Disamping itu pemerataan akses dan ketersediaan fasilitas menjadi faktor yang berkontribusi pada permasalahan akses.

Dukungan riset harus disiapkan untuk membantu implementasi kebijakan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, yaitu: (1) menghilangkan hambatan biaya (*cost barriers*) pendidikan dasar bagi semua siswa dari semua latar belakang sosial-ekonomi; (2) membangun “SD-SMP Terpadu” daerah yang paling rendah aksesnya; (3) mengembangkan pendidikan dasar alternatif untuk memperluas akses bagi anak usia sekolah 7-15 tahun yang belum terlayani di jalur pendidikan formal; dan (4) menetapkan “zoning” layanan pendidikan dasar pada tingkat kelurahan.

## 2. Upaya mewujudkan mutu, relevansi, dan keunggulan pendidikan

Dalam penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh PISA, Indonesia masih tetap berprestasi rendah, dibandingkan negara lain dengan tingkat perekonomian menengah dan negara-negara tetangga di Asia Timur. PISA menguji anak usia 15 tahun yang seharusnya masih sekolah di SMP, oleh karena itu hasil ini tidak mencerminkan kualitas pendidikan SMA. Namun demikian, hasilnya mencerminkan keterampilan yang dimiliki calon siswa SMA. Prestasi Indonesia di PISA tidak terlalu mengecewakan dibanding prestasi negara-negara yang memiliki pendapatan per-kapita jauh lebih tinggi seperti Malaysia dan Thailand. Akan tetapi, sekali lagi dibandingkan dengan Vietnam negara dengan PDB per kapita lebih rendah, siswa 15 tahun di Indonesia tercatat memiliki tingkat pembelajaran yang lebih rendah (BAPPENAS B, 2014).

Permasalahan yang cukup mendasar dalam semua penyelenggaraan pendidikan, termasuk di Jawa Barat adalah kurikulum, pembelajaran dan manajemen sekolah yang kurang kondusif bagi peserta untuk belajar secara optimal karena proses pembelajaran yang rendah kualitasnya (*rote learning*). Oleh karena itu diperlukan perubahan mendasar dalam pendekatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan budaya belajar (*learning culture*) melalui proses yang nyaman, menyenangkan, dan menarik sehingga peserta didik dapat belajar optimal. Dukungan riset yang

akan membantu menyelesaikan permasalahan ini menjadi sangat diperlukan.

### 3. Pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja

Sistem pendidikan yang relevan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja. Satuan pendidikan harus mampu menawarkan program-program pendidikan yang paling diminati oleh masyarakat sebagai *stake holder*. Setiap satuan pendidikan akuntabel terhadap mutu lulusan yang dihasilkannya kepada *stakeholder* pendidikan terutama peserta didik, masyarakat, dunia kerja, dan Pemerintah. Dalam pendidikan kejuruan, yang dimaksud dengan peserta didik adalah semua anggota masyarakat pada semua tingkat usia yang ingin mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Namun dalam kenyataan tidak semua harapan peserta didik dapat dipenuhi oleh pendidikan. Banyaknya pengangguran merupakan indikator bahwa program-program pendidikan kurang relevan dengan kebutuhan lulusan, masyarakat dan lapangan kerja. Statistik ketenagakerjaan, misalnya, menunjukkan bahwa dari 1.876.020 angka pengangguran di Jawa Barat 14,81 % merupakan lulusan SMK, dan 20,06% merupakan lulusan SMA (BPS Jawa Barat B, 2015). Berdasarkan data ini diperlukan riset-riset yang akan memberi inspirasi dan landasan program peningkatan kualitas keterampilan lulusan SMK, serta kerjasama SMK dengan industri.

### 4. Efisiensi sistem pendidikan

Upaya untuk meningkatkan pencapaian dan memperbaiki kualitas pendidikan tidak akan berhasil tanpa investasi yang memadai. Namun, sebagian besar investasi yang diperlukan bisa didapatkan dari penghematan efisiensi anggaran pendidikan saat ini serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta. Disamping itu, tata kelola dan akuntabilitas pendidikan menjadi mendukung penting dalam mendukung keterlaksanaan ketiga pilar di atas. Tata kelola yang berbasis sistem informasi yang didukung oleh mutu dan keunggulan tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta pengelola, dan penyelenggara satuan pendidikan akan mempermudah pencapaian

target pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Untuk itu riset yang berkaitan dengan pengembangan tata kelola pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik perlu dilakukan.

Di samping empat pilar kebijakan strategis, dalam melakukan riset yang mendukung pembangunan pendidikan di Jawa Barat, ruang lingkup pembangunan sistem pendidikan nasional yang mencakup 6 (enam) program utama harus juga menjadi perhatian. Keenam program pembangunan pendidikan nasional adalah: (1) Pendidikan Dasar untuk Semua; (2) Pendidikan Menengah Universal; (3) Pendidikan Kejuruan, Vokasi, dan Profesi; (4) Pendidikan Nonformal; (5) Guru dan Tenaga Kependidikan; dan (6) Manajemen Mutu Pendidikan; dan (7) Pengelolaan Pendidikan.

### **3.1.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama**

Penelitian di bidang pendidikan harus mengarah kepada pemenuhan data, informasi, dan pengetahuan yang akan menjadi dasar penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Orientasi pengembangan yang dilakukan harus berpijak pada upaya untuk mengintegrasikan nilai budaya sunda dengan tetap mengadaptasi keahlian hidup yang diperlukan dalam pergaulan global.

Prioritas utama pelaksanaan riset bidang pendidikan di Jawa Barat adalah menggali dan mengidentifikasi masalah pendidikan di Jawa Barat dalam upaya:

- Memecahkan masalah akses, relevansi dan mutu pendidikan dengan mengintegrasikan nilai budaya sunda dan keahlian global dalam sistem pendidikan
- Meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara mengintegrasikan nilai budaya sunda ke dalam sistem pendidikan serta mengadaptasi keahlian hidup yang diperlukan secara global
- Memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan efisiensi sistem pendidikan di Jawa Barat.

**Tabel 3.1. Arah Kebijakan Riset Bidang Pendidikan**

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul terjangkau dan merata	Menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau	Pendidikan gratis dasar menengah (SD, SLTP dan SLTA) dalam rangka penuntasan wajar dikdas dua belas tahun pada tahun 2018	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS, SMP terbuka SD-SMP satu atap, APK SD/MI, APK SMP/MTS, angka melanjutkan SMP ke SMA, APK SMA/MA/SMK Sederajat	(1) Jabar bebas putus jenjang sekolah, Beasiswa Pemuda, Keluarga Atlit, Guru, Tenaga Medis, Bantuan Pendidikan dan Sekolah Gratis, (2) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi serta Pembangunan Perguruan Tinggi di Luar Domisili dan Penegrian	Pengembangan model pengelolaan layanan pendidikan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan, yang meliputi: * Studi evaluasi ketuntasan wajar dikdas 9 tahun dan kesiapan wajar 12 tahun (Implementasi PMU) di Jawa Barat * Model penerimaan siswa dengan sistem kluster dan zonasi * Sistem informasi sarana dan prasarana pendidikan (perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan) * Study kelayakan pembentukan LPDP Daerah Jawa Barat
		Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah, tinggi dan pesantren	Jumlah uang kelas SMP/MTS		
		Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI	Jumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima beasiswa		
		Penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa PTN/PTS	Jumlah penerima beasiswa yang melanjutkan ke PTN/PTS (Pemuda keluarga atlit berprestasi guru, mahasiswa)		
Meningkatkan jumlah dan kualitas rintisan sekolah standar nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP	Perwujudan rintisan sekolah standar nasional (RSSN) dan sekolah standar nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas	Jumlah SD, SMP yang berstandar nasional dan jumlah sekolah yang terakreditasi	Jabar bebas putus jenjang sekolah, Beasiswa Pemuda, Keluarga Atlit, Guru, Tenaga Medis, Bantuan Pendidikan dan Sekolah Gratis	Pengembangan model pendidikan untuk peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan, melalui: * Survey dan pemetaan kualitas pendidikan Jawa Barat * Integrasi nilai dan budaya sunda ke dalam sistem pendidikan * Adaptasi 21st century skills ke dalam sistem pendidikan menengah	

					di Jawa Barat * Relevansi dan mutu pendidikan SMK: Pemetaan kebutuhan, penyesuaian bidang keahlian, dan implementasi Public Privat Partnership
	Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan	Jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4		Pengembangan model penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan * Pemetaan kompetensi (termasuk latar belakang pendidikan) guru di Jawa Barat * Pengembangan profesionalisme guru (TPD); * Pengembangan sistem remunerasi daerah dan penilaian kinerja guru * Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan; Sistem perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan Jawa Barat
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan usia dini	Peningkatan pendidikan usia dini di Jawa Barat	APK pendidikan Anak Usia Dini		Pengembangan model pembinaan dan penyelenggaraan PAUD
	Mengembangkan pendidikan inklusif	Peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus	Meningkatkan jumlah SLB Negeri Jumlah guru SDLB/SMPLB/SMA LB/SMKLB/berkualifikasi S1		Pengembangan model pembinaan dan penyelenggaraan sekolah luar biasa dan pendidikan inklusi
	Menuntaskan buta aksara	Perwujudan masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara	Angka buta aksara		Model pendidikan non formal berbasis kewirausahaan berbasis untuk peningkatan RLS

	Mendukung perpustakaan di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT	Terwujudnya perpustakaan Jawa Barat bertaraf internasional guna mendukung masyarakat gemar membaca	Efektifitas kualitas layanan perpustakaan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan komunikasi		Model pembinaan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat
			Tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKN) masyarakat di Jawa Barat		

### 3.1.3. Tema Riset

Tema Riset Pendidikan Jawa Barat 2016-2018 adalah “Pemenuhan akses, relevansi, dan mutu pendidikan melalui integrasi budaya sunda, adaptasi keahlian global, dan revitalisasi sistem tata kelola dan akuntabilitas pendidikan”.

### 3.1.4. Tema Riset Unggulan

Tema riset yang diharapkan menghasilkan luaran khas dan keunggulan Jawa Barat adalah:

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan, serta penurunan angka Drop Out
2. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan
3. Penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Peningkatan sistem manajemen pendidikan, serta kapasitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan
5. Peningkatan layanan dan kapasitas pendidikan masyarakat, nonformal, dan pendidikan anak usia dini

**Tabel 3.2. Tema Riset Unggulan**  
Peningkatan akses dan layanan pendidikan, serta penurunan angka Drop Out

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1.	Evaluasi ketuntasan wajar dikdas 9 tahun dan kesiapan wajar 12 tahun (Implementasi PMU) di Jawa Barat	Rekomendasi kebijakan penuntasan wajar dikdas dan pelaksanaan wajar 9 tahun dan kebijakan implementasi PMU di Jawa Barat	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS, SMP terbuka SD-SMP satu atap, APK SD/MI, APK SMP/MTS, angka melanjutkan SMP ke SMA, APK SMA/MA/SMK Sederajat Jumlah ruang kelas SMP/MTS Jumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima beasiswa Jumlah penerima beasiswa yang melanjutkan ke PTN/PTS (Pemuda keluarga atlit berprestasi guru, mahasiswa)	Dinas Pendidikan
2	Sistem informasi sarana dan prasarana pendidikan (perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan)	Informasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan		Dinas Pendidikan
3	Model penyelenggaraan pendidikan; sistem zonasi, pendidikan inklusi	Rekomendasi mengenai sistem pengelolaan pendidikan seperti penerapan sistem zonasi, dan model pendidikan inklusi		Dinas Pendidikan

**Tabel 3.3. Tema Riset Unggulan**  
Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Pemetaan kualitas pendidikan di Jawa Barat	Rekomendasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat	Jumlah SD, SMP yang berstandar nasional dan jumlah sekolah yang terakreditasi	Dinas Pendidikan
2.	Integrasi nilai dan budaya sunda ke dalam sistem pendidikan	Rekomendasi model-model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai dan budaya sunda		Dinas Pendidikan
3.	Adaptasi 21st century skills ke dalam sistem pendidikan menengah di Jawa Barat	Rekomendasi model-model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai dan keterampilan global		Dinas Pendidikan
4.	Relevansi dan mutu pendidikan SMK: Pemetaan kebutuhan, penyelarasan bidang keahlian, dan implementasi Public Privat Partnership	Peta kebutuhan SMK; lokasi dan program studi yang sesuai kebutuhan Rekomendasi model kerjasama SMK dengan industri		Dinas Pendidikan



**Tabel 3.4. Tema Riset Unggulan**  
Penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1.	Pemetaan kompetensi (termasuk latar belakang pendidikan) guru di Jawa Barat	Peta kompetensi guru dan tenaga kependidikan di Jawa Barat Model program untuk pemerataan kompetensi	Jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4	Dinas Pendidikan
2.	Sistem perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan Jawa Barat	Peta Sebaran guru dan tenaga kependidikan Jawa Barat Peta kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Jawa Barat		
3.	Pengembangan profesionalisme guru (TPD);	Model pengembangan profesionalisme guru dalam aspek Pedagogi Content Knowledge, classroom teaching, student well being, dan achievement)		Dinas Pendidikan
4.	Pengembangan sistem remunerasi daerah dan penilaian kinerja guru	Rekomendasi sistem penghargaan daerah Jawa Barat kepada para guru		Dinas Pendidikan

**Tabel 3.5. Tema Riset Unggulan**  
Peningkatan sistem manajemen pendidikan, serta kapasitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Studi kelayakan pembentukan LPDP Daerah Jawa Barat	Rekomendasi tentang kemungkinan bentuk pembiayaan pendidikan non APBD	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS, SMP terbuka SD-SMP satu atap, APK SD/MI, APK SMP/MTS, angka melanjutkan SMP ke SMA, APK SMA/MA/SMK Sederajat	Dinas Pendidikan
2	Evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan	Rekomendasi tentang prioritas urusan pendidikan yang bisa diimplementasikan sesuai UU		Dinas Pendidikan

**Tabel 3.6. Tema Riset Unggulan**  
Peningkatan layanan dan kapasitas pendidikan masyarakat, nonformal, dan pendidikan anak usia dini

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Pengembangan model pembinaan pendidikan anak usia dini	Model pembinaan pendidikan anak usia dini	APK pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
2	Pengembangan model pembinaan pendidikan non formal berbasis	Model pembinaan pendidikan non formal berbasis kewirausahaan	"Meningkatkan jumlah SLB Negeri Jumlah guru SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB/ber	Dinas Pendidikan

	kewirausahaan berbasis untuk peningkatan RLS	berbasis untuk peningkatan RLS	kualifikasi S1" Angka buta aksara	
3	Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemberantasan buta aksara	model pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemberantasan buta aksara	Jumlah penduduk melek huruf	Dinas Pendidikan
4	Peningkatan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Model pembinaan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Efektifitas kualitas layanan perpustakaan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan komunikasi Tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKN) masyarakat di Jawa Barat	Dinas Pendidikan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

## 3.2. Bidang Kesehatan

### 3.2.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, sosial dan spiritual, tidak saja terbebas dari penyakit, agar manusia dapat produktif secara ekonomi. Kesehatan merupakan investasi dan hak ajazi setiap individu. Kesehatan masyarakat adalah ilmu, seni dan praktik yang diarahkan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan semua orang, memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif, atau tindakan sosial, untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan, dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

Derajat Kesehatan masyarakat Jawa Barat saat ini tidak terlalu baik dibandingkan provinsi lainnya. Indikator kematian ibu dan bayi memperlihatkan posisi Jawa Barat berada di kelompok urutan terbawah antar provinsi. Gangguan nutrisi, baik makro maupun mikro, pada bayi dan remaja menunjukkan tren meningkat.

Berbagai penyakit menular seperti TBC, HIV memperlihatkan tren meningkat. Bahkan penyakit lama seperti kusta masih menjadi masalah. Faktor risiko berupa kondisi lingkungan secara keseluruhan dan determinan sosial kesehatan (SDH) tidak memihak kepada upaya penurunan penyakit menular. Penyakit tidak menular seperti jantung dan kardio-vaskular, stroke, DM, memperlihatkan tren sangat meningkat. Bahkan menjadi penyebab kematian

tertinggi saat ini. Faktor risiko perilaku individu dalam hal gaya hidup, diet, merokok dan lain-lain menjadi penyebab mendasar kinerja kesehatan.

Salah satu penyebab rendahnya derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat adalah determinan sosial yang tidak mendukung serta sistem kesehatan yang lemah. Bila melihat sustainable development goals pada tahun 2030, maka semua tujuan (SDGs) tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan Jawa Barat, yaitu derajat kesehatan (goal 3) dan determinannya (16 goal lainnya). Sementara penanganan penyakit sudah dilakukan oleh sistem pelayanan kesehatan yang ada, maka faktor risiko (termasuk gizi) dan penguatan sistem kesehatan menjadi fokus utama yang harus diperhatikan Pemprov Jabar.

Riset adalah kegiatan untuk menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memecahkan masalah manusia, baik individu ataupun masyarakat agar mencapai keadaan optimal untuk produktif secara ekonomi ataupun sosial, sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Performance kesehatan di tingkat provinsi yang kurang baik saat ini perlu ditunjang oleh riset. Pemerintah provinsi menggunakan riset untuk pengembangan, implementasi dan evaluasi kebijakan di sektor kesehatan. Sehingga *evidence based policy* dapat terwujud dan kesehatan sebagai salah satu tujuan dan ukuran pada kesejahteraan masyarakat di wilayah provinsi Jawa Barat dapat diwujudkan dengan baik.

### **3.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sejatinya, riset yang difasilitasi oleh Pemprov Jawa Barat di bidang kesehatan dimaksudkan untuk:

- Membantu pengambilan keputusan oleh pemerintahan daerah dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat di Jawa Barat.
- Memecahkan masalah kesehatan komunitas.

Oleh karena itu, riset lebih banyak menggunakan pendekatan *action research*, *operational research*, *implementation research*, *creative research*, walaupun masih terbuka untuk pendekatan lain. Prioritas riset adalah pada:

1. Riset untuk mengatasi faktor risiko dan gangguan gizi pada anak, wanita dan remaja.

- a. Penanganan faktor risiko dan gangguan gizi makro, meliputi: Karbohidrat, Protein dan Lemak
  - b. Penanganan faktor risiko dan gangguan Gizi mikro, meliputi: Vitamin dan Mineral
2. Riset untuk mengatasi faktor risiko Penyakit Tidak Menular dan Menular
  3. Riset untuk memperkuat sistem kesehatan, termasuk sistem kesehatan jiwa, adiksi dan injuri.

**Tabel 3.7.** Arah Kebijakan Riset Bidang Kesehatan

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerja sama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan	Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan	Presentase Rumah tangga yang ber PHBS	(1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan.	- Pengembangan model rumah tangga ber PHBS - Pengembangan model sistem sanitasi masyarakat - Perbaikan gizi masyarakat melalui inovasi pangan - Sistem informasi kesehatan masyarakat - Prevalensi penyakit menular
			Presentase desa siaga aktif	(2) Peningkatan Fasilitas dan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa	
			Presentase rumah tangga dengan air minum yang layak		
			presentase rumah tangga yang menggunakan jamban sehat		

	Menguatkan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi	Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat	Ratio kematian ibu, ratio kematian bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk, angka kesakitan DBD, presentase Desa/Kelurahan dengan jumlah desa UCI lebih dari 80%, eliminasi tetanus neonaturium, eliminasi campak, kasus lumpuh layuh mendadak (AFP) dalam eradikasi polio global ( anak kurang 15 Tahun), micro filaria rate daerah endemis filarisasi, angka kesembuhan penyakitan TB Paru, Prevalensi HIV/AIDS		
	Menguatkan pembiayaan dan sumber daya kesehatan	Penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan	Presentase puskesmas dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar, presentase rumah sakit dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar, jumlah RSUD mampu PONEK, Presentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONEK dan pemenuhan sumber daya kesehatan	
	Menguatkan manajemen, regulasi teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan	Penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan	Presentase rumah sakit pemerintah menjadi BLUD	Peningkatan Fasilitas dan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa	
	Meningkatkan kualitas dn kuantitas KB	Revitalisasi program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga	Presentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur, penurunan total fertility rate (TFR) melalui PUP penundaan anak pertama dan motivator PUP	Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak serta Layanan Jaminan Kesehatan	

### 3.2.3. Tema Riset

Tema riset kesehatan 2016-2018 adalah penguatan determinan sosial kesehatan untuk mengatasi ancaman kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.

### 3.2.4. Tema Riset Unggulan

Masalah gizi merupakan penyebab mendasar dan merupakan pertahanan individu, keluarga dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kesehatan. Oleh karena itu, tema riset unggulan adalah penguatan determinan sosial kesehatan untuk mengatasi masalah gizi masyarakat sebagai ancaman kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.

**Tabel 3.8.** Tema Riset Unggulan  
Penguatan Determinan Sosial Kesehatan

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Faktor risiko dan gangguan gizi pada anak, wanita dan remaja. Penanganan faktor risiko dan gangguan gizi makro (Karbohidrat Protein, Lemak) Penanganan faktor risiko dan gangguan Gizi mikro (Vitamin, Mineral)	Rekomendasi penguatan determinan kesehatan untuk mengatasi faktor risiko gangguan gizi makro dan mikro	Kematian Ibu Kematian Bayi Prevalensi Gizi Buruk (Status Gizi) PHBS Desa Siaga Aktif Penguatan Kapasitas Pelayanan Dasar dan Rujukan	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BKKBN, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan,
2	Faktor risiko Penyakit Tidak Menular dan Menular	Rekomendasi penguatan determinan kesehatan untuk mengatasi faktor risiko Penyakit Menular dan Tidak Menular		
3	Penguatan sistem kesehatan, termasuk sistem kesehatan jiwa, adiksi dan injuri	Rekomendasi penguatan sistem kesehatan daerah termasuk sistem kesehatan jiwa		

### **3.3. Bidang Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku**

#### **3.3.1. Bidang Infrastruktur Wilayah**

##### **3.3.1.1. Latar Belakang**

Pengembangan dan pengadaan serta pengelolaan Infrastruktur, yang meliputi Infrastruktur transportasi (jalan, jalan rel, pelabuhan, lapangan terbang, dll), sumber daya air (waduk, pengairan, air bersih), listrik dan telekomunikasi, serta bangunan-bangunan (sekolah, pemukiman, rumah sakit dll), merupakan faktor pendukung utama bagi tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan sosial bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Untuk itu maka keberadaan dan penelitian di bidang ini mutlak terus menerus dilakukan untuk menjamin tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera lahir batin.

Di bidang infrastruktur transportasi, masalah mobilitas dan aksesibilitas bagi rakyat dan komoditi barang menjadi isu-isu utama, sementara dalam bidang infrastruktur sumber daya air, jaminan ketersediaan air untuk pertanian dan air minum menjadi isu-isu utama. Tidak kalah pentingnya juga tersedianya listrik dan telekomunikasi yang andal menjadi syarat-syarat keberlangsungan kehidupan di jaman modern ini dengan memanfaatkan berbagai sumber energi dan teknologi. Akhirnya, tersedianya fasilitas umum dan rumah yang memadai, layak huni dan sehat serta dapat dijangkau oleh semua masyarakat merupakan syarat mutlak yang harus selalu diupayakan.

Banyaknya jumlah masyarakat yang membutuhkan dukungan infrastruktur ditambah dengan tingginya angka pertumbuhan populasi dibanding dengan makin sedikitnya sumber daya yang tersedia menyebabkan diperlukannya langkah-langkah untuk selalu bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut yang didukung oleh hasil-hasil penelitian terkait agar pengembangan dan pengelolaan infrastruktur ini dapat dilakukan secara tepat dan sesuai.

### 3.3.1.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka arah dan kebijakan penelitian yang diperlukan di bidang infrastruktur ini terutama ditujukan untuk mendukung keberadaan dan pengelolaan infrastruktur ini secara efektif dan efisien dengan terutama memanfaatkan sumber daya alam, manusia dan kemampuan dana yang ada di Jawa Barat sendiri (mandiri).

Keseimbangan antara tercukupinya kebutuhan (demand) dengan sediaan (supply) merupakan hal terus berkembang sepanjang masa, untuk itu penelitian tentang kedua hal tersebut harus terus diperbaharui sesuai dengan kondisi perkembangan populasi dan kapasitas yang ada, termasuk pencarian sumber-sumber baru.

Mengingat keberadaan masyarakat Jawa Barat yang tersebar didaerah yang cukup luas, maka prioritas pengadaan dan pengelolaan infrastruktur ini tidak hanya terbatas di kota-kota saja, tapi juga harus menjangkau daerah di pelosok seantero provinsi juga.

**Tabel 3.9.** Arah Kebijakan Riset Bidang Infrastruktur

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektor	Arah Kebijakan Riset
Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Peningkatan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Tingkat kemandapan jalan provinsi (kondisi baik&sedang)	Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan	1. Pemanfaatan bahan/materia l (untuk jalan, jembatan dll) lokal; 2. Penggunaan /pemilihan teknologi dan metode konstruksi (sesuai kondisi setempat); 3. Penerapan rekayasa dan manajemen transportasi lalu lintas (sesuai kondisi)



			Tingkat ketersediaan sarpras pendukung	Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya	1. Perkiraan tingkat kebutuhan (demand) dan kapasitas yang harus disediakan; 2. Inovasi sistem pendanaan serta kerjasama pembangunan pemerintah-swasta
			Pengelolaan jalan, ketersediaan informasi jalan dan jembatan	Infrastruktur jalan dan perhubungan, Pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Strategis Lainnya, Air Strip serta Pembangunan Jalan Tol, Jalan Lintas Cepat, Monorel, Kereta Api, dan LRT (Light Rail Transit)	
	Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	Peningkatan konservasi sumber daya air	Penanganan sumber air berupa, situ/waduk, mata air dan sungai	(1)Infrastruktur sumber daya air, dan irigasi strategis serta Pengendalian Banjir; (2) Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan.	

### 3.3.1.3. Tema Riset

Tema Riset Bidang Infrastruktur 2016-2018 meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur di Jawa Barat yang didukung oleh teknologi konstruksi yang handal.

### 3.3.1.4. Tema Riset Unggulan

Tema riset bidang infrastruktur 2016-2018 adalah pemanfaatan bahan material lokal, pemilihan metoda, dan teknologi konstruksi, penentuan

kebutuhan dan kapasitas jaringan, pemberian sistem pendanaan, kerjasama pembangunan serta pemilihan metode pengawasan.

**Tabel 3.10.** Tema Riset Unggulan  
Bidang Infrastruktur

No	Topik	Target 2018	Indikator Keberhasilan 2018	Capaian 2025
1.	Pemanfaatan bahan/material lokal untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur	Rekomendasi bahan/material yg sesuai untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur	Banyaknya penggunaan bahan/material yg sesuai untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur	Kemandirian penggunaan bahan/material lokal
2.	Pemilihan teknologi & metoda konstruksi tepat guna untuk pembangunan maupun pemeliharaan	Rekomendasi teknologi & metoda tepat guna yang sesuai	Banyaknya jumlah teknologi & metoda yang sesuai yang diterapkan	Digunakannya teknologi & metoda konstruksi tepat guna yang sesuai secara meluas di Jawa Barat
3.	Kebutuhan (demand) dan kapasitas yang dapat disediakan (supply) menurut lokasi	Optimasi antara demand vs supply	Jumlah lokasi timbulnya demand & pemenuhan penyediannya	Terpenuhinya kondisi yang seimbang antara demand & pemenuhan penyediannya
4.	Pendanaan dan kerjasama pembangunan	Didapatnya metoda pendanaan dan bentuk kemitraan yang sesuai	Banyaknya penerapan metoda pendanaan dan kemitraan yang sesuai yang dilaksanakan	Terpenuhinya kebutuhan pendanaan dan investasi yang sesuai yang dilaksanakan
5.	Pengelolaan & pengawasan pelaksanaan	Didapatnya rekomendasi metoda pengelolaan dan pengawasan yang sesuai	Banyaknya penerapan metoda pengelolaan dan pengawasan yang sesuai	Meluasnya penerapan metoda pengelolaan dan pengawasan yang sesuai

### 3.3.2. Bidang Energi

#### 3.3.2.1. Latar Belakang

Ketersediaan energi merupakan salah satu factor vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, di Jawa Barat masih ada sekitar 2 juta rumah tangga (16.4%) yang belum mendapat akses listrik. Kebutuhan pasokan listrik akan terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas ekonomi masyarakat. Di tingkat nasional pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 4.6%, dan di Jawa Barat diperkirakan tidak jauh berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan

listrik tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Barat mencanangkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga dengan cara menambah daya terpasang. Saat ini daya yang sudah terpasang di Jawa Barat sebesar 4.654 MW, yang terdiri dari PLTA 1,941 MW, PLT Panasbumi 1,061 MW, dan PLT lainnya 1,652 MW. PLN juga telah merencanakan akan membangun pembangkit listrik baru sebesar 35,000 MW di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat antara lain PLTU Indramayu 2000 MW, PLTA Upper Cisokan 520 MW, PLTA Rajamandala 47 MW dan PLTA Jatigede 110 MW.

Peningkatan daya tersebut telah meningkatkan konsumsi bahan bakar fosil (minyak dan batubara) secara significant, sehingga memberikan konsekwensi yang buruk terhadap lingkungan. Pemerintah Jawa Barat telah merespon isu lingkungan tersebut dengan mencanangkan pengembangan energy baru dan terbarukan sebagai salah satu Bidang Unggulan Jawa Barat.

Agenda Riset Daerah diarahkan untuk merespon isu tersebut dan sekaligus menindaklanjuti kebijakan pemerintah Jawa Barat, dengan memfokuskan riset pada pengembangan dan pemanfaatan energy baru dan terbarukan, seperti panasbumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air (sungai, pasang surut, dan gelombang).

Khusus untuk panasbumi, Jawa Barat telah diketahui memiliki potensi sebesar 6,090 MW, sedangkan yang telah dimanfaatkan baru mencapai 1,060 MW, sehingga masih terbuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

### **3.3.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama**

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan energy adalah:

- a. Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi
- c. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru-terbarukan

### **3.3.2.3. Tema Riset**

Pengembangan dan pemanfaatan energy terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi Jawa Barat.

### 3.3.2.4. Tema Riset Unggulan

- a. Kajian teknologi bersih yang efisien, ekonomis dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energy Jawa Barat
- b. Kajian teknologi pembangkit listrik berbasis sumberdaya lokal

**Tabel 3.11.** Tema Riset Unggulan  
Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga

No	Topik	Target 2016	Indikator Keberhasilan (2016)	OPD Terkait
1	Kajian rasio kebutuhan/ pasokan listrik per daerah (kabupaten dan kota)	Tersedianya data kebutuhan listrik per daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga	BP3IPTEK ESDM
2	Kajian teknologi energi bersih yang sudah proven (ready on call) dari berbagai litbang dan perguruan tinggi	Tersedianya data teknologi bersih yang proven dan siap dimanfaatkan		
3	Kajian Link and match antara kebutuhan listrik, sumberdaya lokal, dan solusi teknologi yang tersedia	Tersedianya rekomendasi teknologi bersih untuk pembangkit listrik		

**Tabel 3.12.** Tema Riset Unggulan  
Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan panasbumi

No	Topik	Target 2018	Indikator Keberhasilan (2018)	OPD Terkait
4	Kajian potensi dan eksplorasi panasbumi	Tersedianya data potensi panasbumi	Meningkatnya pasokan listrik tenaga panasbumi	ESDM BP3IPTEK Kabupaten/ Kota
5	Pemanfaatan panasbumi untuk pembangkit listrik	Tersedianya rekomendasi pemanfaatan panasbumi untuk pembangkit tenaga listrik		
6	Pemanfaatan panasbumi untuk berbagai jenis industri kecil (pengeringan, pariwisata, dsb)	Jumlah industri kecil yang memanfaatkan energy panasbumi		

**Tabel 3.13.** Tema Riset Unggulan  
Pengembangan dan pemanfaatan energi baru-terbarukan

No	Topik	Target	Indikator Keberhasilan (2018)	OPD Terkait
7	Kajian potensi pemanfaatan mikrohidro per kabupaten/ kota	Tersedianya rekomendasi pemanfaatan mikrohidro untuk pembangkit listrik	Jumlah pembangkit listrik berbasis teknologi bersih	BP3IPTEK ESDM Kabupaten/ Kota
8	Kajian pemanfaatan teknologi energi bersih berbasis limbah/ biomasa	Tersedianya rekomendasi teknologi bersih untuk pembangkit listrik	Jumlah pembangkit listrik berbasis energy terbarukan	
9	Kajian pemanfaatan energi surya dan energi angin untuk pembangkit listrik	Tersedianya rekomendasi pemanfaatan energy surya/ angin untuk pembangkit listrik		

### 3.3.3. Bidang Air Baku

#### 3.3.3.1. Latar Belakang

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting untuk tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan sosial, karena tanpa kecukupan air, maka industri pertanian, manufaktur, maupun rumah tangga tidak mungkin berfungsi dengan baik. Kebutuhan air terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas industri, sehingga setiap tahun Jawa Barat selalu mengalami kekurangan air. Di beberapa daerah kekurangan air tersebut telah menimbulkan masalah sosial yang serius, antara lain memburuknya kesehatan masyarakat, menurunnya produksi pertanian, terhambatnya kegiatan industri, dan bahkan pada beberapa daerah memicu konflik sosial. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya agar kebutuhan air baku masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan air baku di Jawa Barat perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Dari tahun ke tahun pasokan sumber air baku (curah hujan, mata air, dsb) secara kuantitas relatif tidak bertambah, sehingga secara alami sulit untuk menambah volume pasokan air baku.
- Kualitas sumber air sebagian besar dalam kondisi buruk karena pencemaran yang disebabkan oleh perilaku tidak ramah lingkungan,

sehingga air sumber memerlukan *pre-treatment* agar memenuhi standar untuk dimanfaatkan sebagai air baku.

- Ketimpangan debit sumber air permukaan antara musim penghujan dan kemarau semakin tinggi, yang berakibat meningkatnya intensitas dan luasan daerah banjir di musim hujan dan daerah kekeringan di musim kemarau. Ketimpangan debit tersebut berkaitan dengan adanya gangguan hidrologi DAS.
- Teknologi pengolahan air telah banyak dikembangkan oleh berbagai lembaga litbang (LIPI, Puskimpraswil, Perguruan Tinggi, dan lainnya) dan siap untuk diimplementasikan, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Arah kebijakan riset daerah hendaknya merujuk dan mempertimbangkan keempat hal tersebut di atas. Tindak lanjut dari kegiatan riset perlu diarahkan kepada implementasi yang sifatnya *action-oriented* agar hasil litbang secara langsung dapat memberikan solusi cepat terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga litbang maupun perguruan tinggi, sehingga pemerintah daerah tidak perlu melakukan riset sendiri dan dapat lebih focus kepada implementasi yang langsung menyelesaikan masalah.

### **3.3.3.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama**

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan air baku adalah:

#### **1. Meningkatkan keandalan pasokan air**

Keandalan pasokan air dilakukan dengan pembangunan infrastruktur sumberdaya air berupa waduk, bendung, embung, dan sejenisnya. Saat ini sebagian besar air pertanian (89%) berasal dari sumber non waduk, seperti sungai, mata air dan sebagainya, yang debitnya berfluktuasi sejalan dengan perubahan musim, sedangkan air pertanian yang berasal dari waduk hanya sekitar 11%. Pembangunan infrastruktur sumber daya air bertujuan untuk menampung/ melakukan konservasi, sehingga air dapat disimpan dalam jangka tertentu dan dapat

dimanfaatkan pada saat diperlukan, baik untuk keperluan pertanian maupun untuk air minum dan keperluan lainnya. Saat ini di Jawa Barat telah ada agenda untuk pembangunan sejumlah waduk, antara lain Jatigede (2014), Sukamahi (2016), Leuwikeris (2017), Cipanas & Sukahurip (2018), dan Matenggeng (2019).

Namun demikian, untuk menjaga kehandalan fungsi waduk tersebut, maka pasokan air sungai yang masuk ke waduk juga harus diperhatikan. Saat ini kesenjangan debit maksimum dan debit minimum beberapa sungai utama di Jawa Barat meningkat. Hal ini menunjukkan sebagian besar DAS di Jawa Barat tidak sehat. Akibatnya di musim kemarau pasokan air ke waduk berkurang dan hal ini tentunya berdampak pada menurunnya pasokan air di hilir baik untuk kebutuhan air bersih domestik, pertanian termasuk oprasional pembangkit listrik di waduk itu sendiri. Oleh karena itu pemulihan kesehatan DAS mutlak diperlukan.

## **2. Meningkatkan ketersediaan air di daerah kawasan kritis air**

Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas dan luas daerah yang mengalami banjir dan kekeringan terus meningkat. Pada musim kemarau tahun 2015, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menyampaikan bahwa dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sudah 15 daerah yang menyatakan siaga darurat menghadapi kekeringan (1). Bencana kekeringan yang terjadi pada musim kemarau 2015 yang lalu, tak hanya mengancam lahan pertanian namun juga lahan perkebunan. Sekitar 10 ribu hektare lahan perkebunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat terancam kekeringan. Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat menyatakan bahwa kebanyakan kekeringan perkebunan terjadi di Jabar Jabar Selatan. Seperti di daerah di Garut, Ciamis, Cianjur, dan Sukabumi. (2). Dinyatakan pula bahwa sebagian besar lahan perkebunan milik Pemprov Jabar yang mengalami kekeringan adalah perkebunan teh. Akibatnya produksi teh milik perkebunan Jawa Barat menurun antara 10 hingga 15 persen per hektarenya. Selain itu produksi kopi di lahan perkebunan milik Pemprov Jawa Barat juga

mengalami penurunan sekitar 10 persen. Untuk kopi, kata dia, produksi di Jabar sekitar 32 ribu ton per tahun turun sekitar 3 ribu ton.

Ketiadaan atau keterbatasan jaringan irigasi di bagian selatan Jawa barat menyebabkan sebagian besar kawasan di daerah ini dapat dikatakan sebagai kawasan kritis air dibandingkan dengan Jawa Barat bagian utara dan tengah. Walaupun dimusim kemarau, beberapa sungai di Jawa Barat selatan seperti Ci Kandang, Ci Sadea, Ci Kaso, Ci Laki, Ci Sanggiri dan sungai-sungai lainnya yang bermuara di bagian selatan Jawa barat tidak pernah kering dan bahkan airnya cukup melimpah, namun dimusim kemarau air sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena topografi wilayah selatan jawa barat relatif bergelombang dan terjal. Sementara posisi sungai berada di bawah/dasar lembah sehingga air tidak dapat dialirkan ke lahan budidaya yang berada di perbukitan. Kondisi topografi yang terjal juga menyulitkan untuk pengembangan jaringan irigasi. Sehingga lahan pertanian yang ada di Jawa Barat bagian selatan sebagian besar tidak produktif karena hanya dapat ditanami sekali tanam di musim penghujan. Oleh karena itu, identifikasi sumber air baku di Jawa Barat bagian selatan perlu dilakukan agar lahan budidaya yang ada saat ini bisa ditanami sepanjang tahun.

### **3. Meningkatkan kinerja infrastruktur air yang sudah ada**

Sebagian infrastruktur air sudah berumur tua, sehingga kemampuannya berfungsi sudah menurun atau rusak sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Pemeliharaan juga perlu ditingkatkan sehingga lebih efisien, terutama infrastruktur irigasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Infrastruktur irigasi perlu mendapat perhatian penting, karena memberikan kontribusi 85% terhadap produksi padi nasional.

Perlu juga diperhatikan bahwa sebagian besar (51%) kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur air merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, yang umumnya tidak memiliki kemampuan anggaran yang mencukupi, sehingga sebagian besar infrastruktur tidak terpelihara dan tidak berfungsi dengan baik. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa infrastruktur yang



dikelola oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten hanya sekitar 40% yang berfungsi dengan baik. Untuk itu koordinasi dan uluran tangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan.

#### **4. Mengurangi tingkat pencemaran sumberdaya air**

Pencemaran merupakan penyebab utama menurunnya kualitas air baku, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10% rumah tangga di Jawa Barat masih melakukan buang air besar di tempat terbuka dan 40% tidak memiliki sistem sanitasi yang memadai, sehingga limbah rumah tangga banyak yang mencemari sumber air. Bahkan di daerah perkotaan sangat umum dijumpai adanya kontaminasi feses pada air sumur yang menjadi sumber air baku penduduk. Pencemaran tersebut telah menyebabkan menurunnya kualitas air baku, sehingga menimbulkan masalah yang serius di bidang sosial dan kesehatan masyarakat. Pengendalian pencemaran antara lain bisa dilakukan dengan pembangunan IPAL, tidak hanya di kawasan industri, tetapi juga di daerah pemukiman penduduk.

#### **5. Meningkatkan pasokan air bersih**

Kemampuan PDAM untuk memberikan layanan air bersih masih terbatas. Dari 400+ PDAM yang ada, hanya 31 PDAM yang mampu memberi layanan kepada lebih dari 50,000 pelanggan, sehingga sebagian besar masyarakat terpaksa mengusahakan air bersih secara swadaya dan seadanya, dengan kualitas yang tidak dapat diandalkan. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa 40% rumah tangga di Jawa Barat belum memiliki akses terhadap air bersih. Kualitas air baku yang tidak memenuhi baku mutu tersebut telah menyebabkan banyak masalah kesehatan, termasuk tingkat kematian balita yang cukup tinggi. Terbatasnya jangkauan layanan PDAM juga menyebabkan masyarakat kurang mampu harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan air bersih.

#### **6. Meningkatkan budaya peduli lingkungan**

Budaya peduli lingkungan memiliki peran strategis dalam memelihara dan meningkatkan kualitas sumberdaya air tanpa harus

menambah bangunan infra-struktur baru yang berbiaya mahal. Budaya peduli lingkungan dapat mengurangi pencemaran sumber daya air di kawasan padat penduduk; mencegah penurunan debit sumber daya air akibat kerusakan lingkungan; meningkatkan konservasi air; dan lain-lain. Budaya peduli lingkungan perlu ditumbuhkan untuk membangun perilaku proaktif ke arah konservasi sumberdaya air dan sumber daya alam lainnya. Pembangunan infrastruktur air bersih dan IPAL tidak akan berarti banyak tanpa didukung budaya peduli lingkungan.

**Tabel 3.14.** Arah Kebijakan Riset Bidang Air Baku

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Memenuhi kebutuhan air bersih di perkotaan dan perdesaan Jawa Barat	Meningkatkan pasokan air bersih di perkotaan dan perdesaan	Membangun infrastruktur sumberdaya air dan irigasi strategis		Peningkatan kapasitas pasokan air bersih	Meningkatkan potensi dan ketersediaan air baku di tiap daerah kabupaten/ kota  Pemanfaatan teknologi produksi/ pengolahan air bersih yang siap digunakan, ekonomis, ramah lingkungan dan mudah dioperasikan (available on call) link and match antara kebutuhan dan teknologi yang tersedia
				Peningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air pertanian	Tingkat kebutuhan infrastruktur air di kewilayahan. Daya dukung daerah untuk membangun infrastruktur air
				Peningkatan kualitas air/ Pengurangan pencemaran	Kajian kewilayahan tentang kualitas dan tingkat pencemaran air di daerah pemukiman padat penduduk
			Kajian teknologi pengolahan limbah cair yang siap digunakan, ekonomis, ramah lingkungan dan mudah dioperasikan		
			Kajian kewilayahan tentang daerah-daerah paling rawan pencemaran untuk menentukan lokasi pembangunan IPAL dan infrastruktur sejenis lainnya		
				Layanan air bersih mencapai 74%	

				Peningkatan budaya peduli lingkungan	Kajian sosial budaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran
					Kajian sosial budaya untuk menghemat penggunaan air
Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik serta rasio elektrifikasi.	meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan	meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi rumah 81%	Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga	Inventarisasi rasio kebutuhan/pasokan listrik per daerah (kabupaten dan kota) Inventarisasi teknologi energi bersih yang sudah proven (ready on call) dari berbagai litbang dan perguruan tinggi
	Meningkatkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah	meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi baru-terbarukan	Jabar mandiri energi untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik	Peningkatan pemanfaatan panasbumi	Link and match antara kebutuhan listrik dan solusi teknologi yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas pasokan listrik
		meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi		pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi	Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di daerah terpencil yang kekurangan/ belum terjangkau listrik
		meningkatkan upaya pengelolaan sumberdaya mineral, geologi dan air tanah	Tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT)	pengembangan panasbumi dan migas	Pemanfaatan panasbumi untuk berbagai jenis industri kecil (pengeringan, pariwisata, dsb)
		meningkatkan pengusahaan nilai tambah dan produksi sumberdaya mineral	Tingkat eksplorasi potensi panas bumi	Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral	Pemanfaatan teknologi energi bersih berbasis limbah/ biomasa
		Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan			Membangun budaya hemat listrik

### 3.3.3.3. Tema Riset

Peningkatan kapasitas, kualitas dan keandalan pasokan air baku dan air pertanian, pengurangan pencemaran air dan membangun budaya peduli lingkungan.

### 3.3.3.4. Tema Riset Unggulan

- a. Peningkatan kapasitas pasokan air bersih
- b. Peningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air pertanian
- c. Peningkatan kualitas air / Pengurangan pencemaran
- d. Peningkatan budaya peduli lingkungan

**Tabel 3.15.** Tema Riset Unggulan  
Peningkatan kapasitas pasokan air bersih

No	Topik	Target 2016	Indikator Keberhasilan (2018)	OPD Terkait
1	Analisis potensi dan ketersediaan air baku di tiap daerah kabupaten/ kota, (khusus untuk kabupaten/kota di bagian selatan Jawa Barat pada skala kecamatan.)	Tersedianya data potensi sumberdaya air Tersedianya data kebutuhan air baku	Terimplementasinya teknologi produksi air bersih	BP3 IPTEK
2	Pemanfaatan teknologi produksi/ pengolahan air bersih yang siap digunakan, ekonomis, ramah lingkungan dan mudah dioperasikan (available on call)	Tersedianya data teknologi pengolahan air bersih yang siap dimanfaatkan	Meningkatnya tingkat layanan air bersih mencapai 74% rumah tangga	
3	Link and match antara kebutuhan dan teknologi yang tersedia	Tersedianya rekomendasi teknologi untuk meningkatkan produksi air bersih		
4	Pengembangan teknologi pengaliran air dari daerah lembah ke area perbukitan.	Tersedianya prototip teknologi pengaliran air dari lembah ke bukit (2016) Penerapan teknologi di berbagai elevasi (2017)	Teralirinya daerah perbukitan dari sumber air sungai di lembah.	
5	Dampak sosial terkait pemulihan kesehatan DAS	Teridentifikasinya faktor sosial (penghambat dan pendukung), serta strategi program pemulihan DAS (2016) Uji coba penerapan strategi program pemulihan DAS (2017, 2018)	Membaiknya kesehatan DAS di daerah uji coba	

**Tabel 3.16.** Tema Riset Unggulan  
Peningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air pertanian

No	Topik	Target 2018	Indikator Keberhasilan (2018)	OPD Terkait
1	Tingkat kebutuhan infrastruktur air di Kewilayahan	Tersedianya data kebutuhan infrastruktur air	Terimplementasinya rekomendasi untuk pembangunan infrastruktur air  Meningkatnya pasokan air untuk pertanian	BPLH Dinas PU Kabupaten/ Kota
2	Daya dukung daerah untuk membangun infrastruktur air	Tersedianya rekomendasi untuk pembangunan infrastruktur air		
3	Kondisi kinerja infrastruktur air yang sudah ada	Jumlah infrastruktur yang menjalani rehabilitasi		

**Tabel 3.17.** Tema Riset Unggulan  
Peningkatan kualitas air / Pengurangan pencemaran

No	Topik	Target	Indikator Keberhasilan (2018)	OPD Terkait
1	Pengukuran kualitas dan tingkat pencemaran air di daerah pemukiman padat penduduk	Tersedianya data kualitas air dan tingkat pencemaran air baku di daerah-daerah	Tersedianya IPAL komunitas di daerah-daerah  Menurunnya tingkat pencemaran sumber air baku  Meningkatnya kualitas air baku	BPLH Dinas PU
2	Pengembangan teknologi pengolahan limbah cair yang siap digunakan, ekonomis, ramah lingkungan dan mudah dioperasikan	Tersedianya rekomendasi teknologi tepat guna untuk pengolahan limbah cair		
3	Daerah-daerah paling rawan pencemaran untuk menentukan lokasi pembangunan IPAL dan infrastruktur sejenis lainnya	Tersedianya rekomendasi daerah-daerah yang memerlukan pembangunan IPAL		

**Tabel 3.18.** Tema Riset Unggulan  
Peningkatan budaya peduli lingkungan

No	Topik	Target (2016)	Indikator Keberhasilan (2018)	OPD Terkait
1	Aspek sosial budaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran	Rekomendasi metoda pendekatan sosial-budaya untuk mengurangi pencemaran	Terbangunnya budaya mencegah pencemaran  Terbangunnya budaya hemat air  Berkurangnya tingkat pencemaran	BPMD Posyandu Camat dan Lurah RW/ RT
2	Aspek sosial budaya untuk menghemat penggunaan air	Rekomendasi metoda pendekatan sosial-budaya untuk perilaku hemat air		

### 3.4. Bidang Ekonomi Pertanian

#### 3.4.1. Latar Belakang

DPI (Dampak Perubahan Iklim) akibat pemanasan global telah membuat dunia ketakutan terjadi keruntuhan ketahanan pangan dan rawan pangan serta dampak buruk lainnya. Indonesia termasuk negara yang diprediksi ketahanan pangannya belum kuat. Pemerintah mencanangkan program ketahanan pangan sebagai output dari pembangunan pertanian. Padahal pembangunan pertanian diharapkan berdampak mampu memiliki daya ungkit terhadap terjadinya divergensi berbagai aktivitas usaha (*backward and forward linkages*) dan bukan hanya untuk ketahanan pangan.

Ketahanan pangan ada jika semua lapisan masyarakat, setiap waktu memiliki kekuatan mengakses baik fisik, ekonomi secara cukup dan aman terhadap makanan bergizi yg cocok dengan kebutuhan agar dapat berktivitas dan hidup sehat (FAO,2008). Menurut UU Nomor 18/2004 Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan”. Tercermin pada UU No. 18 bahwa harus terwujud kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*) dan keamanan pangan (*food safety*). Kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara faktual berkorelasi dengan pembangunan pertanian. Tanpa penguatan dalam pembangunan pertanian untuk memproduksi, mengolah dan mendistribusikan pangan maka kerawanan pangan baik rawan pangan kronik maupun transitori akan terjadi.

Dimensi ketahanan pangan minimal mencakup empat hal pokok yaitu (1) Ketersediaan pangan secara fisik : Ketersediaan pangan berbicara pada sisi pasokan pangan dengan determinasi pada tingkat produksi pangan, cadangan pangan dan perdagangan pangan ; (2) Akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan: Kecukupan pasokan pada tingkat lokal, nasional dan internasional tidak menjamin keamanan pangan pada tingkat rumah tangga. Ketidak cukupan pangan sering disebabkan karena tidak berimbangnya antara pendapatan rendah dengan

pembelanjaan tinggi untuk makanan; (3) Pemanfaatan Pangan: Difahami sebagai cara tubuh memperoleh berbagai jenis nutrisi yang utama pada makanan. Energi yang cukup dan nutrisi yang diserap oleh individu adalah hasil pemeliharaan yang baik dari praktek pola makan, penyiapan makanan, keaneka ragaman diet serta distribusi makanan di dalam rumah; (4) Stabilitas untuk setiap waktu: Kalau hari ini kebutuhan pangan terpenuhi dan cukup, masih ada kemungkinan kita rawan pangan jika akses terhadap pangan pada periode tertentu beresiko atau menurun karena berbagai hal seperti anomali iklim, bencana alam, situasi politik dan krisis ekonomi yang melambungkan harga pangan akan berimpak kepada ketahanan pangan (WFP, 2005).

Dalam rangka penentuan Agenda Riset Daerah Jabar, Bidang Ketahanan Pangan untuk mengantisipasi dan mitigasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) perlu langkah terintegrasi antara inter OPD. *Core business* dalam ketahanan pangan yaitu memproduksi pangan, dan diyakini pemerannya adalah OPD terutama BKPD, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Peternakan, Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan. Program ketahanan pangan selain khusus sebagai mitigasi DPI juga suatu keharusan dari Pemerintah. Penduduk Jawa Barat sudah mencapai 42 juta jiwa seharusnya ada program ketahanan pangan yang implementatif berjenjang mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai dengan propinsi. Dengan fokus kepada ketahanan pangan maka akan tercakup sistim produksi pangan (sumber karbohidrat); jenis komoditas pangan yang diproduksi; akses pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan.

Secara internal tantangan ketahanan pangan untuk Jawa Barat yaitu harus menyediakan beras untuk 42 juta jiwa. Dengan asumsi 35 juta jiwa yang makan nasi dengan konsumsi 90 kg/kapita /tahun (Irianingsih, 2015) maka harus tersedia beras sebanyak 3,15 juta ton beras/tahun. Sampai dengan tahun 2014 Propinsi Jawa Barat berprestasi, masih surplus dengan hasil 11.644.899 ton Gabah Kering Giling atau setara dengan 7.306.009 ton beras (BPS Jawa Barat, 2014). Namun demikian untuk tiga dasa warsa kedepan pola konsumsi yang bertumpu kepada beras harus diubah. Alih fungsi lahan dan DPI harus diimbangi dengan perluasan sawah dan ladang, optimasi teknologi budidaya dan pemahaman diversifikasi pangan.

Untuk mencapai kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan sehingga masyarakat merasa aman dan sejahtera pada setiap waktu, titik tolak dan fokusnya adalah pembangunan ekonomi dan pertanian diperdesaan. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan keterlibatan terstruktur dari berbagai bidang IPTEK agar pembangunan dapat mewujudkan perekonomian yang terus mengalami pertumbuhan. Indikator pertumbuhan dapat diestimasi antara lain dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jawa Barat masih menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4.93% diatas pertumbuhan nasional yang hanya 4.71 % pada triwulan I tahun 2015 ( Ade Rika Agus, 2015).

Sampai dengan sekarang tujuan pokok pembangunan diukur dengan adanya perubahan struktur perekonomian dari pertanian ke industri. Dengan demikian tanpa adanya terobosan untuk intervensi pembangunan pertanian dengan inovasi yang mengkaitkan sektor pertanian dengan industri maka stagnasi PDB pertanian dan transformasi perekonomian akan terjadi. Perekonomian yang berjalan tanpa pertumbuhan, atau dengan pertumbuhan yang bersifat Pareto akan mendorong ketidak puasan masyarakat lalu dapat memicu terjadinya *social-distrust* dan menyulut kecemburuan sosial.

Pembangunan pertanian di Jawa Barat secara luas agar didefinisikan sebagai suatu proses transformasi perubahan sosial. Jadi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan, tetapi juga berdampak memacu potensi fitrah manusia untuk menjadi SDM yang dapat menguasai dan memanfaatkan kekayaan SDA yang diberikan Allah, mampu melakukan perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*) sehingga status ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan terjamin dan stabil.

### **3.4.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama**

- 1) Optimasi pemanfaatan potensi sumber daya lahan dan agroklimat Jawa Barat bagian selatan.
- 2) Inisiasi penyusunan Pergub turunan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk penyediaan lahan pertanian pangan dan bahan baku industri berbasis pertanian.



- 3) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, tanaman industri dan pengembangan pangan alternatif.
- 4) Peningkatkan mutu produk agar sesuai standar nasional dan internasional.
- 5) Optimasi Sistem Distribusi Pangan (*Supply chain* dan *value chain*) baik untuk ke pasar konsumsi harian maupun untuk cadangan ketahanan pangan.

**Tabel 3.19.** Arah Kebijakan Riset Bidang Ekonomi Pertanian

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agroindustri dan teknologi ramah lingkungan menunjang ketahanan pangan nasional.	(1) Perbaikan mutu input dan output produksi, serta penguasaan teknologi untuk merespon dinamika DPI; (2) Evaluasi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (3) Mengembangkan kawasan komoditi sesuai ekosistem untuk kebutuhan pangan dan bahan baku industri (4) Tenaga Penyuluh berada dibawah kendali satu komando; (5) Perbaikan kerjasama yang aktif, terstruktur antara OPD-BP3IPTEK dengan PT/LPND dan pengusaha.	(1) Inisiasi penyusunan Pergub turunan UU 41/2009 Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; (3) Pengembangan pangan alternatif fokus untuk stock cadangan makanan. (4) Advokasi dan promosi diversifikasi pangan (5) Perbaikan jaringan irigasi dan jalan usaha tani (6) Advokasi dan pengembangan akses terhadap permodalan (7) Fasilitasi aplikasi teknologi dan sarana pengolahan hasil pertanian di sentra-sentra produksi.	(1) Trend peningkatan produktivitas komoditi unggulan (2) Jumlah luas lahan kawasan pertanian pangan/perkebunan minimal tetap;(3) Index Kehilangan Hasil menurun, (4) Draft Pergub Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. (5) Surplus beras dan jagung; (6) Mengembangkan dua varietas unggul baru tanaman pangan (7) Konsumsi beras perkapita di Jawa Barat turun sebesar 0.5 % per tahun (8) Kecukupan cadangan pangan; (9) Irigasi tersier dan jalan usaha tani	(1) Pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani. (2) Adopsi teknologi budidaya precision farming dan pasca panen; (3) Pemacuan penggunaan pupuk organik untuk peningkatan produksi tanaman unggulan pangan dan tanaman industri; (4) Penguatan pasar komoditi di kawasan; (5) Pendampingan pemanfaatan lahan tidur dan revitalisasi sistem "lumbung desa/perelek"	(1) Optimasi pemanfaatan potensi dan keunggulan sumber daya lahan dan iklim (2) Intervensi teknologi baik on farm maupun off farm agar kapasitas dan mutu produksi tanaman pangan dan tanaman industri meningkat;(3) Mewujudkan sistem pertanian industrial berdayasaing; (4) Pengembangan komoditas unggul baru yg adaptif terhadap DPI (Dampak Perubahan Iklim); (5). Penguatan stock cadangan pangan di setiap kawasan untuk antisipasi rawan pangan ; (6) Pengembangan pangan alternatif untuk substitusi beras; (7) Penguatan kelembagaan koperasi sebagai

			meningkat.		kolateral akses permodalan.
	(1) Meningkatkan produksi , inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan; (2) Inisiasi agro-industri yang memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang (backward and forward linkages)	(1)Optimalisasi rantai pasar dan value chain (2) Peningkatan mutu hasil pertanian/perkebunan (3) Revitalisasi kelembagaan pertanian dan koordinasi lintas sektor.	(1) Terbentuknya networking dan atau pasar komoditi; (2) Peningkatan produktivitas komoditi	(1) Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry (2) Penguatan penanganan segar (fresh handling) dan moda transport komoditi produk segar (3) Perbaikan produktivitas dan mutu produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif terutama yg dinyatakan Geo-Indication; (4) Inisiasi pengembangan OVOP (One Village One Product); (5)Pengembangan nilai tambah produk, baik produk antara (intermediate product), produk semi akhir (semi finished product) dan produk akhir (final product);	(1) Pengembangan kluster industri pengolahan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya (forward and backward linkage industries); (2) Penguatan penanganan segar fresh handling) untuk meningkatkan mutu produk sesuai standar nasional dan internasional (3) Mengembangkan industri pengolahan yang berdampak meningkatkan nilai tambah dan ekspor serta memenuhi kebutuhan dalam negeri; (4) Optimalisasi Sistem Distribusi Pangan (Supply chain dan value chain) baik untuk ke pasar konsumsi harian maupun untuk cadangan ketahanan pangan; (5) Pengembangan networking dan pasar komoditas; (6) Penguatan kelembagaan koperasi sebagai kolateral akses permodalan;

	Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil dipantai selatan dan pantai utara melalui gerakan pengembangan perikanan pantai utara dan pantai selatan (GAPURA)	(1) Revilatisasi masyarakat perikanan dan kelautan; (2) Advokasi akses permodalan untuk armada kapal yang modern.	Produksi perikanan budidaya dan ikan tangkap meningkat sebesar 5 %	(1) Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional (2) Penguatan Kelembagaan Koperasi dan pemberdayaan penyuluh.	(1) Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya; (2) Penguasaan teknologi penangkapan dan pengolahan merespon DPI.
		Revilatisasi dermaga perikanan di pantai selatan dan utara	Jumlah sentra industri pengolahan hasil perikanan	Penguatan kelembagaan dan pelatihan SDM yang miliki kompetensi mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan	(1) Inisiasi pendirian "product development" hasil tangkapan ikan skala UKM; (2) Pembinaan industri olahan ikan budidaya dan ikan tangkap
	Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan	Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Meningkatkannya produksi kayu, jumlah kelompok kerja penunjang imbal jasa lingkungan, tingkat partisipasi masyarakat desa sekitar hutan dalam pengelolaan	(1) Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry (2) Pengembangan kawasan desa lestari	(1) Sinergitas perencanaan dan program melalui perwujudan kesamaan persepsi pemantapan kawasan hutan dan kawasan lindung (2) Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (3) Optimalisasi partisipasi penanaman rehabilitasi lahan kritis dengan MDH.
			Unit hutan rakyat bersertifikasi	Advokasi pengelolaan hutan	Tersusunnya rencana pembangunan Kehutanan Provinsi Jabar
			Jumlah hutan rakyat bersertifikasi lestari	lestari kepada semua pemangku	Kegiatan reboisasi kawasan hutan yang termonitor
			Jumlah industri	kepentingan	Pengamatan partisipatif

			kehutanan yang tertib perijinannya		kawasan hutan
			Jumlah industri primer kehutanan	Terkendalinya pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	Reboisasi dan pemanfaatan lahan kritis untuk secara partisipatif

### 3.4.3. Tema Riset

Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agroindustri, teknologi ramah lingkungan menunjang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan dan kedaulatan pangan.

### 3.4.4. Tema Riset Unggulan

1. Optimasi sistem produksi pangan melalui perbaikan input dan output produksi, infrastruktur dan supra struktur
2. Evaluasi Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Penguasaan teknologi merespon dinamika DPI
4. Pengembangan kluster industri pengolahan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya (*forward and backward linkage industries*)
5. Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluh dan Revitalisasi Kerjasama antar OPD dengan LPND/PT dan Pengusaha.
6. Revitalisasi dan pemanfaatan lahan tidur milik Pemda/Negara
7. Efektivitas pemupukan berimbang peningkatan produktivitas komoditas GI (Geographical Indication)
8. Perbaikan budidaya penghasil pangan alternatif dan sosialisasi pemanfaatan hasil panen.
9. Revitalisasi dan pemanfaatan lahan tidur milik Pemda/Negara

**Tabel 3.20.** Tema Riset Unggulan Daerah Pertanian Berbasis Agroindustri

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	INSTANSI TERKAIT
1	TEMA RISET (1) JAWA BARAT SEBAGAI DAERAH PERTANIAN	(1) Peningkatan produktivitas komoditi	(1) Tersusun road map ARD BP3IPTEK	OPD Pemprop Jabar yang

	BERBASIS AGROINDUSTRI	unggulan (2) Distribusi dan ketersediaan pangan serta bahan baku industri olahan hasil terpenuhi, (3) Draft Pergub Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.(4) Inisiasi industri olahan hasil pertanian spesifik daerah (OVOP) berbasis komoditas	Jabar sampai dengan 2025; (2) Terbentuknya SDM untuk ARD dan tupoksinya. (3) Lol tentang rencana jaringan kerja dengan mitra (PT, Lembaga Penelitian dan LSM) baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjang ketahanan pangan; (4) Industri olahan hasil pertanian berkelanjutan skala rumah tangga di Jabar meningkat minimal 2 %	terkait; LPND; PT; KADIN; APINDO; LSM; PERINDAG; PERBANKAN
	Sub-Topik (1)	(1) Tersedia pupuk organik dengan mutu yang baik; (2) Teknologi percepatan pengolahan kompos; (3) Tersedianya benih unggul dan aksesible;	(1) Penggunaan pupuk organik meningkat dan efisiensi penggunaan pupuk buatan mulai tahun 2016; (2) Index Kehilangan Hasil Panen padi, jagung, kentang dan mangga 'Gedong Gincu' menurun; (3) Infra struktur dan teknologi sistem produksi benih tersedia; Terbangun jaringan pemasaran di kawasan komoditi pangan dan tanaman industri ; (4) Volume jaringan irigasi tersier meningkat.	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; PT; KEMENTAN; PU
	Optimasi sistem produksi pangan melalui perbaikan input dan output produksi, infrastruktur dan supra struktur.	(4)Kapasitas sistem produksi benih kentang 'Granola' dan varitas unggul Jabar meningkat 100 % (5) Peningkatan volume jaringan irigasi tersier sebesar 6 % .		
	Sub Topik (2) Evaluasi Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	(1) Pergub Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ; (2) Terbentuknya kawasan pangan lestari komoditas unggulan di Jawa Barat Selatan	(1) Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten/Kota mulai berlaku; (2) BUMD Jabar membangun " PT Perkebunan Pangan" di tanah milik Pemda Jabar; (3) Luas sawah dan kawasan pertanian pangan/perkebunan meningkat sebesar 1 % ;	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; PT; BPN; PU

	Sub Topik (3) Penguasaan Teknologi merespon dinamika DPI	(1) Terbangun prototipe rumah kasa model (percission farming) untuk produksi benih sumber terbangun di kawasan komoditas ; (2) Terlaksana gerakan tanam pangan (sukun/mangga) satu pohon satu halaman; (3) Tersedia embung cadangan air dikawasan lahan pangan	(1)Meningkatnya penggunaan komoditas varietas unggul tahan cekaman lingkungan; (2) Terbangun kerjasama sistematis dengan BMKG untuk peramalan cuaca kondusif bagi usaha; (3) Survai Peta kesesuaian lahan Jabar Selatan.	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; KEMANTAN; PT; BMKG; PT
	Sub Topik (4) Mendorong tumbuhnya back ward dan forward industry produk pertanian dalam arti luas	Inisiasi pembangunan satu kawasan agroindustri dengan keterkaitan hulu hilir (backward and forward industry)	(1) Penetapan kawasan satu komoditas, (2) Tumbuhnya industri olahan hasil panen skala UMKM didukung kecukupan energi dan transportasi.	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; KEMANTAN; PT; PERINDAG; PERBANKAN
	Sub Topik (5) Pemberdayaan Penyuluh sebagai perekayasa sosial	(1) Terjalin hubungan simbiose mutualistik antara petani produsen-pengusaha-konsumen; (2) Terbentuk Kelompok Penyuluh Mandiri dan Mitra Cai minimal satu desa satu kelompok; (3) Revitalisasi Kelompok Penyuluh dan Mitra Cai.	(1); (2) Keterampilan dan pengetahuan petani tentang dunia usaha meningkat; (2) Terbentuknya kerjasama dengan penyuluh gizi masyarakat, chef dan perhotelan untuk promosi diversifikasi pangan; (3) Setiap OPD yang menangani Ketahanan Pangan memiliki gugus yang berfungsi sebagai penyuluh/ perekayasa sosial.	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; KEMANTAN; PT; PU
2	TEMA RISET (2) TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN MENUNJANG KETAHANAN PANGAN	(1) Penurunan penggunaan pupuk buatan (2) Peningkatan manajemen OPT berbasis teknologi dan ramah lingkungan; (3) Jawa barat surplus beras dan jagung; (5) Konsumsi beras perkapita di Jawa Barat turun sebesar 0.5 % per tahun; (6) Memiliki sumber pangan alternatif diluar beras.	(1) Meningkatnya penggunaan pupuk organik; (2) Menurunya penggunaan pestisida; (3) Naiknya demmand terhadap komoditi diluar beras; (4)Terbangun lumbung desa dan cadangan pangan	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; KEMANTAN; PT;
	Sub Topik (1) Revitalisasi dan Reorientasi Kelembagaan	(1) Terbentuk kelembagaan ad hoc yang kaya fungsi dan ramping struktur. (2)	(1). Dokumen Lol/MoU dari para fihak; (2) Pertemuan/Monev	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; KEMANTAN;

		Rekomendasi perbaikan penurunan input eksternal pertanian berkelanjutan (Low External Input Sustainable Agriculture)	aktivitas dengan para fihak berjalan rutin minimal setiap bulan menghasilkan notulasi tertulis sebagai dokumen; (2) Terjadi sinkronisasi program kerjasama yang sistemik antar OPD/BP3IPTEK dengan mitra (Pakar berbagai bidang/ PT, LPND dan Pengusaha)	PT
	Sub Topik (2). Efektivitas pemupukan berimbang peningkatan produktivitas komoditas GI (Geographical Indication)	Teknik pemupukan efisien dan manajemen unsur hara untuk komoditas unggulan GI (al. mangga 'Gedong Gincu'; manggis 'Puspahiyang, padi 'Pandan wangi'; ubi jalar 'Cilembu'	(1). Peningkatan produktivitas dan mutu hasil panen;	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; KEMENTAN; PT
	Sub Topik (3) Perbaikan budidaya penghasil pangan alternatif dan sosialisasi pemanfaatan hasil panen.	(1).Paket teknologi budidaya komoditas hanjeli; sukun, pisang plantain dan kecipir; (2) Resep olahan berbasis pangan alternatif	(1)Tersosialisasikan jenis sumber cadangan pangan; (2) Masyarakat mulai mengkonsumsi makanan berbahan baku non-beras dan non-terigu.	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; PT; Asosiasi Cheff Indonesia Jabar
	Sub Topik (4) Revitalisasi dan pemanfaatan lahan tidur milik Pemda/Negara	(1) Peta kesesuaian lahan komoditas ;(2)Lahan tidur milik Pemda Jabar menjadi penghasil komoditas tanaman pangan dan industri.	(1) Terjadi peningkatan luas lahan pertanian, peternakan, perkebunan; (2) Peningkatan margin BUMD; (3) BUMD menjadi holding company dan bermitra dengan swasta	OPD Pemprop Jabar yang terkait; LPND; KEMENTAN; PT;PERBANK AN;

### 3.5. Bidang Ekonomi Non Pertanian

#### 3.5.1. Latar Belakang

Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih menjadi PR besar bagi pemerintah pusat, demikian pula bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Saat ini ketika kondisi ekonomi Jawa Barat yang melambat sejak tahun 2014, sejalan dengan pelambatan ekonomi nasional dan dunia, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat masih cukup

besar. Data bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 4.327.065 orang (9,44 persen) yang jika dibandingkan dengan bulan September 2013 yang berjumlah 4.375.172 orang (9,61 persen) angka tersebut menunjukkan masih diperlukan kerja keras pemerintah daerah untuk menekan angka penduduk miskin secara lebih signifikan.

LPE Jawa Barat tahun 2014 sebesar 5,06 dan tahun 2015 yang diperkirakan akan mencapai 4,97 atau maksimal 5, menunjukkan tren pelambatan dibandingkan LPE tahun 2013 yang mencapai angka diatas 6. Jika melihat angka PDRB (Produk Regional Domestik Bruto) perdaerah kabupaten dan kota se Jawa Barat, yang menunjukkan besaran nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh suatu daerah, dimana peta sebaran PDRB(berdasarkan data tahun 2011) seprovinsi Jawa Barat, sebesar 326 T, 53 % dikontribusi hanya oleh 5 kabupaten/kota, dari total jumlah 26 kota dan kabupaten seJawa Barat. Artinya selain laju pertumbuhan ekonomi yang harus terus ditingkatkan, sebaran kegiatan atau penumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi juga harus terus diupayakan dilakukan.

Untuk itu diperlukan kajian-kajian strategis yang menstudi inovasi-inovasi baru, strategi-strategi khusus, serta terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat dalam menyusun kebijakan dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan dan mengontrol implementasinya secara kuat, sehingga target-target yang diharapkan dipastikan tercapai. Sehingga Jawa Barat masuk dalam *toplist* target investasi bagi para investor, dimana mereka nyaman dengan layanan pemerintah yang proaktif, yang didukung sederhana dan jelasnya masalah perijinan, serta baiknya infrastruktur di wilayah-wilayah pertumbuhan baru.

RPJMD Jawa Barat telah mengakomodasi strategi dan rencana pembangunan berdasarkan wilayah yang meliputi pembangunan kawasan metropolitandan pusat-pusat pertumbuhan baru, yang terdiri atas :

- a. Wilayah I Bogor yang mencakup daerah Bogor, Sukabumi dan Cianjur dengan fokus pada pengembangan pusat penelitian dan pembenihan serta ekonomi agro (bisnis dan wisata) dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pelabuhan Ratu.
- b. Wilayah II Purwakarta, yang meliputi Purwakarta dan Subang (Purwasuka), dengan fokus sebagai pusat pasokan pangan (beras) dan pengembangan



industry manufaktur dan pengolahan, yang bersama-sama wilayah I (Bogor) membentuk Metropolitan Bodebek Karpur.

- c. Wilayah III Cirebon, yang meliputi Cirebon Indramayu Majalengka dan Kuningan, dikenal sebagai klaster Ciayumajakuning, yang dikembangkan sebagai Metropolitan Cirebon dengan pusat pertumbuhan Area Kertajati dengan Bandara Internasionalnya. Adapun basis pengembangannya difokuskan kepada : Pusat pengembangan buah-buahan tropis, pusat perdagangan komoditas beras, pusat pengembangan industri batik dan mebel dan kerajinan rotan, dan wisata sejarah,
- d. Wilayah IV Priangan yang meliputi Kawasan cekungan Bandung, Sumedang, Garut , Tasikmalaya dan Ciamis, dengan pengembangan Klaster Metropolitan Bandung dan pusat pertumbuhan ekonomi baru : Pangandaran dan Rancabuaya. Adapun pengembangannya difokuskan kepada : Pendidikan dan Riset, Teknologi informatika/ITC, Peternakan dan perikanan, pengembangan tanaman industri dan hortikultura untuk ekspor, dan pusat pengembangan industri kreatif.

### 3.5.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama

Dengan permasalahan dan tantangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan RPJMD tersebut diatas, maka DRD perlu menentukan Arah Kebijakan Riset dan Prioritas Utama, sehingga dapat menjadi kontribusi positif bagi akselerasi tercapainya tujuan RPJMD Jawa Barat tersebut. Untuk itu Arah Kebijakan Riset dan prioritas utama yang diusulkan adalah

- a. **Meningkatkan Investasi Daerah** melalui *Pengembangan Strategi promosi dan informasi tentang peluang investasi dan usaha, dengan penyederhanaan dan peningkatan pelayanan dan perizinan sesuai arah dan strategi pembangunan daerah/wilayah, dengan memanfaatkan teknologi informasi/ICT.*
- b. **Meningkatkan jumlah dan kualitas Wirausahawan**, melalui 1). *Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, Melalui kerjasama dengan Institusi Praktisi bisnis dan Perguruan Tinggi/pusat studi manajemen bisnis, 2). Meningkatkan Advokasi/ perlindungan dan*

*dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM, dan 3). Meningkatkan kesadaran masyarakat dan generasi muda tentang pentingnya keberadaan dan jumlah wirausahaan di sebuah masyarakat, sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah 4). Peningkatan standard kualitas desain dan kapasitas produksi usaha IKM/Industri Kecil dan menengah, 5).Membangun kemitraan strategis antara IKM kelompok karet, plastik dan logam, sebagai bagian supply chain komponen untuk industri otomotif dan permesinan di wilayah jawabarat., dan 6). Membangun kualitas bisnis telematika, khususnya kelas start-up, sehingga berpotensi dikembangkan ke tingkat nasional dan global, dan dilirik oleh investor besar/dunia.*

- c. **Memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dan regional,** melalui
- 1). Menekan tingkat kejadian kerawanan pangan diberbagai daerah (pedesaan) di seluruh Jawa Barat,
  - 2). Penumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi pedesaan, berbasis potensi setempatnya,
  - 3).Dukungan pembangunan prasarana jalan disentra pertanian, wisata dan industri manufaktur,
  - 4). Dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah,
  - 5). Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri untuk produk-produk berbasis budaya dan makanan tradisi
  - 6). Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta
- d. **menata distribusi barang yang efektif dan efisien,**
- 1).Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional,
  - 2).Pengembangan metropolitan bodebek karpur, metropolitan bandung raya, dan metropilitan cirebon raya, dan
  - 3).Pengembangan pusat pertumbuhan baru Pelabuhan ratu, Pangandaran dan Rancabuaya.

### **3.5.3. Tema Riset**

Adapun tema riset berdasarkan arah kebijakan riset dan Prioritas utama diatas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan investasi daerah melalui promosi investasi, peningkatan standard, perbaikan mekanisme dan perbaikan waktu proses atas pelayanan perijinan investasi daerah melalui penyempurnaan Rencana Tata Ruang

Wilayah, penyederhaan proses perijinan dan peningkatan kualitas SDM dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

- b. Peningkatan jumlah dan kualitas wirausaha baru di daerah melalui penyusunan program kewirausahaan yang terintegrasi, yang meliputi sosialisasi kewirausahaan kepada generasi muda dan fasilitasi dalam bentuk pusat-pusat inkubasi, dengan pelibatan organisasi pengusaha (Kadin/Asosiasi) dan Perguruan tinggi bisnis.
- c. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD, Koperasi dan UMKM dalam proses pembangunan daerah, melalui peningkatan dukungan fasilitasi dan peningkatan standard evaluasi kinerja manajemen yang terukur dan berkesinambungan.

#### 3.5.4. Tema Riset Unggulan

Dengan kondisi waktu yang terbatas sampai dengan tahun 2018, maka tema riset unggulan yang dapat ditawarkan pada saat ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.21.** Tema Riset Unggulan  
Bidang Ekonomi Non Pertanian

No	Topik	Target 2018	Indikator Keberhasilan 2018	OPD Terkait
1	Kebijakan tentang Peningkatan Investasi daerah	Deregulasi kebijakan investasi daerah yang lebih atraktif bagi investor	Terwujudnya standard minimum pelayanan investasi daerah tkt. Prov/kota/kab yang lebih sederhana dan terukur baik dari sisi prosedur, waktu pengurusan dan besaran biaya	Bapeda, BPMD, Yantap
			Tersedanya layanan online yang mencakup informasi RTWR/RDTR perdaerah kab/kota, rencana pengembangan sektor usaha unggulan daerah dan aplikasi pengajuan perijinan investasi serta "trace" progres perijinan yg sudah diajukan bagi investor.	Bapeda, BPMD,
			Terbangunnya budaya "service exellent" pada semua staf OPD yang berhubungan dengan pelayanan perijinan investasi.	Bapeda, BPMD, Indag,
			Terwujudnya sinkronisasi dan Pembakuan RTRW/RDTR antar wilayah	Bapeda
			Terciptanya lapangan kerja baru dan turunnya angka pengangguran di jawabarot sebesar 25 persen dari dibanding tahun 2015	Bapeda, Disnaker
2	Kebijakan tentang Peningkatan jumlah dan kualitas	Terbentuknya Pusat pelatihan dan inkubasi	Keluarnya kebijakan yang lebih komprehensif dalam penumbuhan wirausaha baru yang berfokus pada sosialisasi budaya wirausaha,	Bapeda, Disnaker, Dinas Koperasi/UKM,

	wirausaha baru /KUKM yang terintegrasi dan efektif.	bisnis di setiap daerah kota/ kabupaten	pelatihan, fasilitasi modal kerja dan pendampingan usaha.	Kadin dan Asosiasi pengusaha, Perguruan Tinggi
			Teralokasikannya sumber pembiayaan dari APBD untuk melaksanakan program tersebut secara berkesinambungan	Bapeda, Disnaker, Dinas Koperasi/ UMKM
			Terbentuknya database UMKM yang kredible di setiap daerah kota/ kabupaten	Diskop/UMKM
			Berubahnya paradigma program penumbuhan wirausaha baru/KUKM dari pendekatan proyek (jk.pendek) menjadi pendekatan terintegrasi yang lebih profesional dan berkesinambungan, yang melibatkan organisasi pengusaha dan Perguruan tinggi bisnis.	Bapeda, Disnaker, Dinas Koperasi/ UKM, Kadin dan Asosiasi pengusaha, Perguruan Tinggi
3	Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD/Koperasi dan UKM dalam pembangunan ekonomi daerah	Meningkatnya jumlah PAD yang berasal dari pajak dan retribusi BUMD, Koperasi dan UKM	Meningkatnya pengukuran kinerja manajemen BUMD yang dimiliki daerah, dengan mengadopsi standard kinerja perusahaan swasta sejenis	Gubernur, Biro ekonomi prov, BUMD
			Terwujudnya perbaikan dan peningkatan standard kenyamanan dan penataan pasar tradisional, sehingga pasar menjadi pusat kegiatan ekonomi dan gaya hidup masyarakat mengundang anak muda berkreatifitas.	Bapeda, Dinas Kop/ukm, Dinas pasar kab/kota, Dinas pemuda

### 3.6. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

#### 3.6.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan cita-cita Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua” maka harus dilakukan upaya untuk mengurangi kendala yang akan mengganggu dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi Jawa Barat adalah tingginya potensi bencana, khususnya bencana banjir yang harus ditangani secara tuntas dan pengendalian lingkungan hidup terkait dengan pesatnya pembangunan fisik. Jawa Barat sendiri, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pembangunan Kewilyahan telah menetapkan kawasan strategis nasional yaitu:

- 1) Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu;
- 2) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Kondisi Jawa Barat pada umumnya ditutupi lahan yang subur sebagai modal dasar pembangunan utamanya untuk pertanian. Lahan subur tersebut bersumber dari hasil pengendapan material vulkanis yang terbawa oleh banyak aliran sungai

yaitu sungai Cisadane, Sungai Ciliwung, Sungai Cisande, Sungai Cimandiri, Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, dan Sungai Citanduy. Jawa Barat sebagai provinsi yang dekat dengan pusat kemajuan pembangunan seperti Jakarta, selain memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan infrastruktur juga menanggung beban pembangunan seperti tingginya tingkat urbanisasi, pertumbuhan kota tidak terkendali, kekurangan suplai air bersih, alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, serta meningkatnya limbah padat dan cair bersumber dari industri dan domestik yang kemudian mencemari badan sungai maupun lahan.

Jawa Barat memiliki 62 Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan luas 32.074,40 Km<sup>2</sup>, disusun oleh 3.502 buah sungai dan 5 wilayah sungai (WS) dengan wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 2 buah, yaitu Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, dan Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno. Sekitar 40 atau 65% daerah aliran sungai yang melintas di Jawa Barat meliputi wilayah sungai (WS) Ciliwung-Cisadane, Cisadea-Cibareno, Citarum-Cisokan, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy, Ciwulan-Cilaki, saat ini dalam kondisi rusak dan kritis baik secara kualitatif maupun kuantitatif mulai dari hulu tengah, hilir hingga muara. Secara ilmiah, DAS memiliki fungsi hidrologis untuk: a) mengalirkan air; b) menyangga kejadian puncak hujan; c) melepas air secara bertahap; d) memelihara kualitas air dan e) mengurangi pembuangan massa (seperti tanah longsor).

Kerusakan lingkungan telah menyebabkan rusaknya kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) dan seluruh ekosistemnya termasuk cekungan airtanah (CAT) yang secara langsung menyebabkan bencana banjir dan kekeringan. Cekungan airtanah di Jawa Barat berjumlah 27 cekungan yang terdiri dari 8 cekungan lokal, 15 cekungan lintas kabupaten/kota dan 4 cekungan lintas provinsi. 27 cekungan airtanah memiliki luas sekitar 26.307 km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah total potensi airtanah bebas sekitar 15,377 milyar m<sup>3</sup>/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan sekitar 985 juta m<sup>3</sup>/tahun.

Ke arah utara dataran Jawa Barat, kawasan pantai utara Jawa Barat atau dikenal sebagai Kawasan Pantura mengalami tekanan pembangunan dan degradasi lingkungan cukup berat karena menanggung beban pembangunan, bencana banjir tahunan di musim penghujan dan kekeringan pada saat musim kering, sedangkan

kawasan selatan pantai Jawa Barat, selain berpotensi mengalami ancaman abrasi pantai juga memiliki potensi bencana tsunami.

Kerusakan lingkungan terutama pada sungai-sungai utama di Jawa Barat tidak saja pada aspek fisik, namun juga aspek kualitas. Air sungai yang masih dipakai untuk berbagai keperluan baik untuk pengembangan energi, pemenuhan kebutuhan air bersih (domestik maupun industri) dan untuk kebutuhan pengairan (pertanian dan perikanan) pada saat ini sudah tercemar. Pencemaran badan air sebagian besar disebabkan masuknya limbah-limbah cair industri dari industri yang belum terolah dengan baik, limbah domestik yang tidak melalui pengolahan, air permukaan yang mengalir ke daerah pertanian, serta akibat pengelolaan sampah yang belum optimal. Rendahnya kualitas badan air utama di Jawa Barat akan menyulitkan upaya-upaya pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas lingkungan perairan secara keseluruhan di Jawa Barat.

#### **3.6.1.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama**

Kebijakan riset daerah diperlukan untuk mendukung pencapaian solusi permasalahan terkait dengan penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup. Arah kebijakan riset untuk Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek antara lain:

1. Basis data kejadian banjir sebagai alat peringatan;
2. pemanfaatan teknologi peringatan dini banjir;
3. program penyodetan aliran sungai dan
4. rekayasa saluran pembuangan perkotaan;
5. intensifikasi sumur resapan buatan di kawasan serapan dan perkantoran atau gedung bertingkat

Terkait dengan kegiatan Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province, maka arah kebijakan riset yang meliputi:

1. Basis data kemajuan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas, kawasan pesisir dan pulau kecil;
2. piloting bibit unggul padi dan non padi;
3. Program implan mangrove dan karang untuk rehabilitasi;

4. Piloting pupuk organik untuk ketahanan pangan;
5. Kajian keamanan bendungan Jatigede

Menyangkut isu Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional, maka arah kebijakan riset seperti diuraikan di bawah ini:

- 1) site asesment daerah-daerah rawan pencemaran tanah akibat pencemaran limbah industri.
- 2) Teknologi pengolahan limbah industri untuk SMEs.
- 3) sistem pengendalian pencemaran industri.
- 4) teknologi sanitasi untuk daerah-daerah khusus terutama daerah pesisir.
- 5) Kajian pengolahan sampah waste to energy pada skala-skala kecil.
- 6) Kajian pengendalian pencemaran sungai Citarum dan waduk-waduk besar.
- 7) Sistem pengendalian pencemaran air limbah domestik pada bantaran-bantaran sungai

**Tabel 3.22.**Arah Kebijakan Riset Bidang Lingkungan Hidup

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	Peningkatan kinerja penataan ruang	Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (Dokumen RDTR kab./Kota)	(1)Penangan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya.(2)Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan. (3)Kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan, Sanitasi Lingkungan, Kawasan Aetropolis Kertajati serta Pengembangan Kota Baru;	1)Infrastruktur lingkungan diarahkan untuk mendapatkan sistem maupun teknologi penyediaan air bersih yang sesuai dengan karkteristik daerah, Misalnya daerah pesisir, daerah perkotaan dengan sumber air baku yang sudah tercemar, daerah hulu(pegunungan) dan daerah kering. 2)Mendapatkan teknologi dan sistem infrastruktur sanitasi yang sesuai dengan karakteristik daerah seperti dijelaskan pada point 1)

			Tingkat penanganan Raperda KSP (Kaw. Strategis)		
	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana	Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri	Pencapaian status mutu sungai utama waduk besar dengan tingkat cemar sedang	(1)Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional. (2)Penanganan bencana longsor dan banjir	1) site assessment daerah-daerah rawan pencemaran tanah akibat pencemaran limbah industri. 2) Teknologi pengolahan limbah industri untuk SMEs. 3) sistem pengendalian pencemaran industri. 4) teknologi sanitasi untuk daerah-daerah khusus terutama daerah pesisir. 5) Kajian pengolahan sampah waste to energy pada skala-skala kecil. 6) Kajian pengendalian pencemaran sungai Citarum dan waduk-waduk besar. 7) Sistem pengendalian pencemaran air limbah domestik pada bantaran-bantaran sungai.
	Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%	
	Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup	Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan	Capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah	Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Lindung 45%	



		Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Tingkat rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara		Rehabilitasi bekas pertambangan dengan penghijauan tanaman penghasil minyak
		Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut	Tingkat rehabilitasi mangrove (rusak 15.000 Ha kemampuan rehabilitasi 1.000 Ha/thn)		

**Tabel 3.23.**Arah Kebijakan Riset Bidang Kebencanaan

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup (untuk mendukung Ketahanan pangan Jawa Barat)	1) Kepastian hukum penggunaan-pemanfaatan ruang sepanjang aliran sungai dan daerah dataran banjir; 2) Membangun kepedulian dan kewaspadaan banjir melalui komunitas pendidikan dan organisasi massa; 3) Pemeliharaan rutin jaringan saluran pembuangan perkotaan	1) Penataan dan penguatan aspek hukum dalam penggunaan-pemanfaatan ruang sepanjang aliran sungai dan daerah dataran banjir; 2) sosialisasi masif seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan bekerjasama dalam penanganan banjir; 3) penataan jaringan saluran pembuangan di perkotaan	1) Berhasilnya penanganan banjir lintas wilayah prioritas (di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek), Jawa Barat ; 2) Secara bertahap dipatuhinya kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan aliran sungai dan dataran banjir; 3) tertanganinya banjir Cileuncang di kawasan perkotaan	1. Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek	1) Basis data kejadian banjir sebagai alat peringatan; 2) pemanfaatan teknologi peringatan dini banjir; 3) program penyodetan aliran sungai dan 4) rekayasa saluran pembuangan perkotaan; 5) intensifikasi sumur resapan buatan di kawasan serapan dan perkantoran atau gedung bertingkat

	1) Pengelolaan kawasan hulu DAS lintas batas kabupaten/kota; 2) pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu; 3) insentif penggunaan pupuk organik; 4) Kawasan Bendungan Jatigede sebagai lumbung pangan	1) Penguatan aspek hukum dan komitmen dalam pemanfaatan ruang kawasan hulu DAS Prioritas serta kawasan pesisir dan pulau kecil; 2) Gerakan penghijauan di kawasan hulu dan DAS Prioritas; 3) pemanfaatan pupuk organik dan pupuk murah	a) Menurunnya laju kerusakan kawasan hulu DAS Prioritas; b) Menurunnya tingkat kerusakan ekosistem Kawasan Pesisir dan pulau Kecil; c) Meningkatnya peranan Bendungan Jatigede sebagai sumber energi listrik, penanganan banjir kawasan timurlaut Jawa Barat (Subang-Pamanukan-Indramayu-Cirebon) dan pengairan di kawasan timur Jawa Barat	2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province, serta dukungan percepatan pembangunan Bendungan Jatigede	1) Basis data kemajuan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas, kawasan pesisir dan pulau kecil; 2) piloting bibit unggul pada dan non padi; 3) Program implan mangrove dan karang untuk rehabilitasi; 4) Piloting pupuk organik untuk ketahanan pangan; 5) Kajian keamanan bendungan Jatigede
	1) Peningkatan standar minimum layanan limbah rumah tangga; 2) Tersedianya tempat-kawasan pengelolaan limbah dalam kerangka Otda; 3) Mendorong dunia pertanian memanfaatkan pupuk organik; 4) Kampanye bahaya limbah dengan menggunakan berbagai media tersedia	1). Penguatan aspek hukum dalam aspek pengendalian pencemaran limbah; 2) Komitmen pemerintah Jawa Barat dalam kebijakan pengelolaan limbah rumah tangga; 3) Diseminasi dan sosialisasi bahaya limbah pada tataran komunitas/masyarakat, dunia pendidikan dan industri;	a) Berhasilnya pengendalian pencemaran limbah (cair dan padatan); b) dimanfaatkannya sampah sebagai sumber energi, dan bahan pupuk organik; c) tersedianya sarana pengelolaan sampah regional; d)meningkatnya kesadaran masyarakat dan industri akan ancaman pencemaran limbah	3. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional	1) Pemanfaatan teknologi siap pakai pengurai limbah cair dan padat industri hasil penelitian kementerian/ lembaga/perguruan tinggi; 2) Pemanfaatan pupuk organik dalam kegiatan pertanian; 3) Pengembangan media komunikasi dan sosial sebagai alat kampanye ancaman pencemaran limbah

### 3.6.2. Tema Riset

Pengendalian pencemaran limbah terutama limbah cair (industri dan domestik), limbah padat (sampah) melalui pengembangan teknologi pengolahan limbah yang inovatif, implementatif dan antisipatif; penanganan bencana, dan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.

### 3.6.3 Tema Riset Unggulan

Tema Riset Unggulan Bidang Lingkungan adalah:

1. Teknologi siap pakai untuk pengendalian limbah industri golongan SMEs
2. Teknologi pengolahan limbah industry berdasarkan teknologi modern (advance) yang inovatif sesuai dengan kondisi Jawa Barat.
3. Teknologi pengolahan limbah yang mengarah kepada pemanfaatan reclaimed water (daur ulang)
4. Pengolahan limbah padat yang inovatif dan implementatif serta dapat dilakukan secara masal

**Tabel 3.24.** Tema Riset Unggulan Bidang Lingkungan

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	INSTANSI TERKAIT
1	Pemanfaatan teknologi siap pakai pengurai limbah cair dan padat hasil penelitian kementerian/ lembaga/perguruan tinggi; Terutama yang berorientasi kepada Industri kelompok SMEs dan limbah domestik	Teridentifikasinya teknologi pengolahan limbah yang inovatif yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang memiliki potensi untuk diaplikasikan pada pengendalian limbah industry dan domestic yang bakumutunya diatur pada permen LH no 5 tahun 2014	Bertambahnya industry industry yang bakumutunya diatur pada permen LH no 5 tahun 2014, yang memenuhi bakumutu lingkungan	Perguruan tinggi di Jawa Barat, LIPI, Departemen Perindustrian, Puslitbangkim BP3IPTEKS, BPLHD
2	Pengembangan teknologi modern (advance) untuk pengolahan limbah industri dari industri-industri yang besar	Tersedianya teknologi modern yang dapat mengendalikan pencemaran akibat limbah yang dikeluarkan oleh industry-industri besar	Berkurangnya dampak lingkungan akibat industry besar. Perbaikan kualitas tanah serta badan air disekitar industry besar.	Perguruan tinggi di Jawa Barat, LIPI, Departemen Perindustrian, Puslitbangkim BP3IPTEKS, BPLHD, Industri-industri besar
3	Pengembangan teknologi yang mengarah kepada pemanfatan Reclaimed Water (Air Daur Ulang).	Tersedianya berbagai teknologi pengolahan limbah yang sekaligus dapat mengolah limbah terolah menjadi air daur ulang	Berkurangnya pengambilan air baku dari sumber-sumber konvensional (air tanah, mata air, sumur, danau) oleh industry-industri	Perguruan tinggi di Jawa Barat, LIPI, Departemen Perindustrian, Puslitbangkim BP3IPTEKS, BPLHD, Industri-industri besar
4	Pengembangan teknologi pengolahan dan pengelolaan limbah padat (termasuk sampah), lumpur yang inovatif sesuai dengan kondisi Jawa Barat.	Tersedianya berbagai teknologi berbasis bio maupun kimia-fisika yang dapat mengolah dan mengendalikan timbulan sampah serta lumpur	Berkurangnya volume sampah yang memerlukan prosedur pembuangan akhir	Perguruan tinggi di Jawa Barat, LIPI, Departemen Perindustrian, Puslitbangkim BP3IPTEKS, BPLHD, Industri-industri besar,

				kementerian PU, Dinas Kebersihan
5	Penyediaan data pencemaran tanah akibat pengelolaan limbah industri yang tidak optimal	Tersedianya data-data lahan tercemar di Jawa Barat lengkap dengan karakterisasi lokasi serta tatacara pemulihan lahan tercemarnya.	Berkurangnya praktik-praktik pembuangan limbah secara langsung keatas/kedalam tanah	Perguruan tinggi di Jawa Barat, LIPI, Departemen Perindustrian, Puslitbangkim BP3IPTEKS, BPLHD, Industri-industri besar, kementerian PU, Dinas Kebersihan
6	Pengembangan model dan teknologi inovatif untuk antisipasi pencemaran tanah dan air tanah	Tersedianya model-model pencemaran tanah/air tanah di Jawa barat, lengkap dengan metoda pemulihannya	Terkendalikannya kasus-kasus pencemaran tanah oleh berbagai sumber pencemar industri	Perguruan tinggi di Jawa Barat, LIPI, Departemen Perindustrian, Puslitbangkim BP3IPTEKS, BPLHD, Industri-industri besar, kementerian PU, Dinas Kebersihan

**Tabel. 3.25. Tema Riset Unggulan Bidang Kebencanaan**

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	INSTANSI TERKAIT
1	1. Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek	Berkurangnya frekuensi banjir di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek	Terbentuknya master plan penanganan banjir lintas wilayah	Dinas Kehutanan, BPLHD, BP3IPTEK, Dinas PSDA,
			Implementasi master plan penanganan banjir lintas wilayah	
2	2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province, serta dukungan percepatan pembangunan Bendungan Jatigede	Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province, serta dukungan percepatan pembangunan Bendungan Jatigede	Disusunnya masterplan Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas	Dinas Kehutanan, BPLHD, BP3IPTEK, Dinas PSDA,
			Implementasi master di Citarum	
3	3. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional	Berkurangnya pencemaran limbah industri, limbah domestik	Teridentifikasinya titik titik pencemaran limbah industri, limbah domestic	Dinas Kehutanan, BPLHD, BP3IPTEK, Dinas PSDA,
			Pelaksanaan program pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic di sebagian besar titik yang telah teridentifikasi	

### 3.7. Bidang Seni Budaya

#### 3.7.1. Latar Belakang

Kebudayaan adalah perwujudan cipta, karya dan karsa masyarakat dan merupakan keseluruhan daya upaya masyarakat untuk mengembangkan harkat dan martabat manusia, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan dalam segenap bidang kehidupan. Sebagai bagian dari budaya nasional, budaya Jawa Barat memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari budaya lainnya di Nusantara. Secara umum masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda, dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo *silih asih, silih asah dan silih asuh*. Selain itu budaya Jawa Barat juga memiliki nilai-nilai khas seperti kesopanan, rendah hati terhadap sesama, hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih muda.

Pembangunan bidang budaya di Jawa Barat telah menghasilkan berbagai kemajuan yang ditandai oleh semakin besarnya kontribusi kebudayaan daerah Jawa Barat dalam memajukan kebudayaan nasional. Kendatipun demikian pembangunan bidang kebudayaan di Jawa Barat masih menyisakan sejumlah persoalan, di antaranya adalah: (1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; (2) Kurangnya eksplorasi dan inventarisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Barat; (3) Belum terbentuknya skema implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal pada tingkatan sosial di Jawa Barat; (4) Rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya lokal dan sejarah lokal; dan (5) Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan latar belakang seni sehingga pengelolaan aspek kesenian dirasakan belum optimal.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan adanya pemikiran terbaik melalui kegiatan riset untuk menghasilkan: (1) Berbagai strategi dan model peningkatan pelestarian budaya lokal Jawa Barat agar tetap lestari tidak mengalami kepunahan; (2) Berbagai program untuk meningkatkan upaya pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya Jawa Barat; (3) Berbagai pendekatan untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat; (4) Berbagai media untuk memberikan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan,

komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat Jawa Barat; dan (5) Berbagai upaya terpadu agar dapat mewujudkan Jawa Barat sebagai pusat budaya.

### 3.7.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama

- ✓ Peningkatan pelestarian budaya lokal
- ✓ Peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya
- ✓ Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat
- ✓ Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat
- ✓ Terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya

**Tabel 3.26.** Arah Kebijakan Riset Bidang Budaya

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya, dan pariwisata	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan aksara daerah	Peningkatan pelestarian budaya lokal		Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat.	1. Peningkatan pelestarian budaya lokal 2. Peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya 3. Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat 4. Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat 5. Terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya
	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejahteraan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah	Terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya			

	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah	Peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya		Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat.	(1) Mengembangkan Pusat Seni Jawa Barat (West Java Art Center); (2) Meningkatkan gelar karya seni dan budaya Jawa Barat di dalam dan luar negeri.
	Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) dalam bidang seni dan budaya	Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat			
	Meningkatkan SDM Bidang Seni dan Budaya	Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat		Pengembangan destinasi wisata.	Mengembangkan pariwisata dan produk wisata budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa Barat.

### 3.7.3. Tema Riset

Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan Jawa Barat sebagai pusat budaya

### 3.7.4. Tema Riset Unggulan

1. Pelestarian budaya lokal Jawa Barat
2. Pelestarian seni dan perfilman daerah Jawa Barat
3. Pengembangan pusat gelar karya seni dan budaya Jawa Barat
4. Perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat
5. Penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat pegiat seni dan budaya Jawa Barat
6. Pengembangan Jawa Barat sebagai pusat budaya.
7. Pengembangan Pusat Seni dan Budaya Jawa Barat (West Java Arts and Cultural Center).

8. Peningkatan program pendidikan dan pelatihan pelaku dan pengelola seni dan budaya Jawa Barat.
9. Pemberian anugerah seni dan budaya kepada para pelaku dan pengelola seni dan budaya Jawa Barat.

**Tabel 3.27. Tema Riset Unggulan  
Pelestarian Budaya Lokal, Seni, dan Perfilman Jawa Barat**

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, aksara daerah Jawa Barat.	Rekomendasi model peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, aksara daerah Jawa Barat melalui jalur pendidikan formal. Rekomendasi model peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, aksara daerah Jawa Barat melalui jalur pendidikan keluarga dan masyarakat. Rekomendasi model peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, aksara daerah Jawa Barat melalui media massa.	Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah	Disparbud; Biro Adm Perekonomian; Bappeda; Biro Adm Pembangunan; Biro Keuangan
2.	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek-aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan keurbakalaan bagi pembangunan budaya daerah Jawa Barat.	Rekomendasi model peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek-aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan keurbakalaan bagi pembangunan budaya daerah Jawa Barat melalui jalur pendidikan formal. Rekomendasi model peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek-aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan keurbakalaan bagi pembangunan budaya daerah Jawa Barat melalui jalur pendidikan keluarga dan masyarakat. Rekomendasi model peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek-aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan keurbakalaan bagi pembangunan budaya daerah Jawa Barat melalui media massa.	Pengelolaan Aspek Kesejarahan, Nilai Tradisi, Permuseuman.  Terwujudnya Pusat Kebudayaan Jawa Barat.	Disparbud; Diskimrum; Biro Adm Perekonomian; Bappeda; Biro Adm Pembangunan; Biro Keuangan
3.	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah Jawa Barat	Rekomendasi model peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah Jawa Barat melalui jalur pendidikan formal. Rekomendasi model peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah Jawa Barat melalui jalur pendidikan keluarga dan masyarakat. Rekomendasi model peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah Jawa Barat melalui media massa.	Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah	Disparbud; Biro Adm Perekonomian; Bappeda; Biro Adm Pembangunan; Biro Keuangan



**Tabel 3.28. Tema Riset Unggulan**  
**Pengembangan Pusat, Perlindungan, dan Pengakuan, Penghargaan dan**  
**Pembinaan Pelaku Karya Seni dan Budaya Jawa Barat**

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan khazanah budaya Jawa Barat	Rekomendasi pengembangan pusat gelar karya seni dan budaya Jawa Barat. Rekomendasi model peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan seni dan budaya Jawa Barat.	Sarana Kesenian di Jawa Barat. Pembangunan Plasa Kreatif.	Disparbud; Biro Adm Perekonomian; Bappeda; Biro Adm Pembangunan; Biro Keuangan
2.	Peningkatan pengelolaan, pengakuan, penghargaan dan pembinaan seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata di Jawa Barat	Rekomendasi model pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya di Jawa Barat. Rekomendasi model pemberian penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata di Jawa Barat.	Pengusulan HaKI Warisan Budaya Tak Benda. Pengusulan HaKI Seni Tradisi Pemberian Penghargaan dan pembinaan di Bidang Seni dan Perfilman. Pembinaan di Bidang Seni dan Perfilman. Pembinaan di Bidang Kebudayaan.	Disparbud; Biro Adm Perekonomian; Bappeda; Biro Adm Pembangunan; Biro Keuangan

**Tabel 3.29. Tema Riset Unggulan**  
**Pengembangan Jawa Barat sebagai Pusat Budaya**

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1.	Revitalisasi infrastruktur budaya kebendaan dalam konteks pendidikan dan destinasi wisata Jawa Barat.	Rekomendasi restorasi pusat gelar seni dan budaya, museum, dan destinasi wisata budaya Jawa Barat. Rekomendasi strategi mengedukasi masyarakat untuk menyintai seni, budaya, museum, dan mengunjungi destinasi wisata Jawa Barat. Rekomendasi promosi dan pemasaran seni, budaya, museum, dan destinasi wisata Jawa Barat. Rekomendasi strategi mengedukasi para pengelola seni, budaya, museum, dan destinasi wisata Jawa Barat untuk memberikan pelayanan prima kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.	Sarana Kesenian di Jawa Barat. Pembangunan Plasa Kreatif. Gelar Seni dan Budaya Jawa Barat	Disparbud; Biro Adm Perekonomian; Bappeda; Biro Adm Pembangunan; Biro Keuangan
2.	Pengembangan kemampuan, penguatan sikap dan daya kritis masyarakat, serta mempertahankan dan merawat kekayaan budaya Jawa Barat.	Rekomendasi strategi akulturasi nilai-nilai budaya daerah Jawa Barat yang dapat memperkuat budaya nasional. Rekomendasi strategi pembinaan sikap dan daya kritis masyarakat Jawa Barat untuk merespons gejala konsumerisme hedonisme, pragmatisme, dan perilaku sosial permisif yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Rekomendasi strategi pengembangan kemampuan masyarakat Jawa Barat mempertahankan dan merawat budayanya yang beragam, sehingga mampu bersinergi secara optimal dan terhindar dari ketegangan dan konflik sosial.	Temu Karya Siswa Jawa Barat Bidang Seni dan Budaya	Disparbud; Dinas Pendidikan; Biro Adm Perekonomian; Bappeda; Biro Adm Pembangunan; Biro Keuangan

## 3.8. Bidang Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Keamanan

### 3.8.1. Bidang Kesejahteraan Sosial

#### 3.8.1.1. Latar Belakang

Secara konseptual ketahanan sosial (*social resilience*) menunjuk pada kelenturan atau fleksibilitas sebuah masyarakat untuk bertahan hidup dan tetap utuh ketika menghadapi tantangan dan kekuatan disintegratif, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Sedangkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) menunjuk pada tingkat kebahagiaan hidup suatu kelompok masyarakat, baik secara ekonomi, secara politik, maupun secara sosial. Kedua konsep tersebut diatas, ketahanan dan kesejahteraan sosial, dapat digambarkan sebagai dua dimensi dari realitas sosial yang sama atau dua sisi dari mata uang yang sama.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan kebijakan khusus terkait dengan masalah ketahanan dan kesejahteraan sosial melalui penurunan pengangguran, yang terdapat dalam *Common Goals 5* tentang *social resilience*, dengan cara meningkatkan ekonomi pertanian dengan kegiatan tematik berupa peningkatan budaya kerja masyarakat, serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha melalui UMKM.

*Common Goal* Nomor 5 juga mengamanatkan adanya upaya pengembangan kapasitas pemerintahan berupa *peningkatan kinerja aparatur* yang meliputi:

1. Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel
2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province
3. Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawasan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan
4. Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan serta penyelesaian masalah perbatasan, aset dan dampak lanjut Daerah Otonom baru

5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan

Kajian pustaka menyimpulkan ada 5 (lima) komponen yang berkontribusi positif pada terbangunnya ketahanan dan kesejahteraan suatu masyarakat. Kelima komponen tersebut adalah:

Landasan tindak;

1. Dasar hukum (*Legal Framework*)
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Modal sosial dasar;

1. Modal sosial (*social capital*) termasuk di dalamnya modal spiritual (*spiritual capital*), modal budaya (*cultural capital*) dan kearifan lokal (*local wisdom*).
2. Institusi sosial (*social institutions*); yaitu kumpulan norma sosial yang menjadi panduan perilaku bagi anggota suatu masyarakat (*blue print for behaviour*) yang di dalamnya memuat susunan ganjaran (*insentive structure*).
3. Jejaring sosial (*social networks*); adalah pertemanan strategis (*strategic alliances*) yang memungkinkan seorang individu dapat memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuannya melewati kemampuan individualnya.
4. Akses terhadap sumber daya dan kegiatan ekonomi (*access on economic resources and activities*); yaitu kemampuan seorang individu di dalam masyarakat untuk menggunakan sumber-sumber daya ekonomi dan terlibat dalam proses-proses ekonomi.

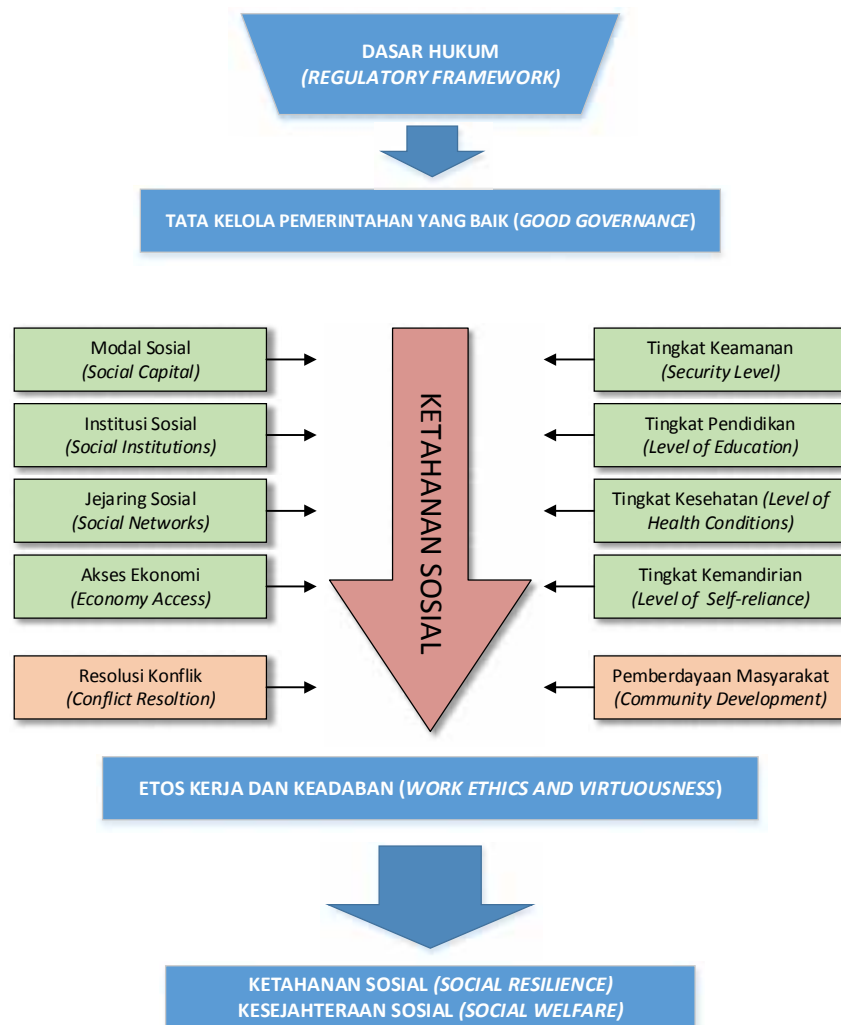
Kondisi-kondisi;

1. Tingkat keamanan sosial sebagai dasar perhitungan risiko dalam menghadapi ketidakpastian, fisik maupun sosial, baik di tingkat lokal, nasional, maupun mondial.
2. Tingkat pendidikan
3. Tingkat kesehatan masyarakat
4. Tingkat kemandirian masyarakat

Tindakan afirmatif (*affirmative action*); yaitu kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif positif untuk memungkinkan sebuah kelompok masyarakat tertentu (biasanya kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat marjinal) untuk memenuhi kebutuhannya (*needs*), mengungkapkan kepentingannya (*interests*), dan menyampaikan apa yang menjadi pusat perhatiannya (*concerns*), seperti juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Ada dua tindakan afirmatif yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memfasilitasi tercapainya ketahanan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Resolusi konflik (*conflict resolution*); yaitu upaya pemerintah untuk mengidentifikasi potensi konflik, memitigasi, dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Kesenjangan yang curam mengenai kepemilikan dan akses terhadap modal sosial, institusi sosial, jejaring sosial dan sumberdaya ekonomi, merupakan sumber konflik yang sangat potensial, baik konflik yang bersifat horisontal maupun vertikal, baik di tingkat individual maupun komunal, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Pemberdayaan masyarakat (*community development*); yaitu tindakan pemerintah untuk melakukan penyadaran, pelibatan, penguatan dan pemandirian, pengembangan kapasitas, pelebagaan nilai-nilai dan norma sosial, dan penjaminan keberlanjutan setiap program melalui pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*).

Tujuan antara dan tujuan akhir; etos kerja (*work ethic*) dan keadaban sebagai warga negara yang berbudi luhur (*virtuous citizenship*) merupakan tujuan antara yang perlu dicapai sebagai katalisator tercapainya tujuan akhir, yakni ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila digambarkan dalam sebuah diagram, kelima komponen tersebut akan tampak dalam bagan berikut ini.



**Gambar 3.1.** Bagan Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial

### 3.8.1.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama

Berikut adalah 23 arah kebijakan yang diturunkan dari matriks Arah Kebijakan Riset Provinsi Jawa Barat Berdasarkan RPJMD 2013-2018

1. Kajian tentang isu publik yang bersifat kritis dan strategis di setiap Kabupaten/kota.
2. Kajian tentang keselarasan produk hukum di setiap Kabupaten/Kota dengan hukum yang lebih tinggi.
3. Kajian kelembagaan tentang kinerja lembaga dan aparat penegakan hukum di setiap Kab/Kota.
4. Evaluasi tentang efektivitas sosialisasi produk hukum yang dilakukan di setiap Kab/Kota.

5. Kajian kelembagaan tentang organisasi dan aparat ketertiban dan keamanan di setiap Kab/Kota.
6. Evaluasi basis data profile PMKS di setiap Kab/Kota.
7. Kajian perilaku tentang kemandirian PMKS dalam mengatasi masalah mereka.
8. Evaluasi program-program rehabilitasi PMKS yang sudah ada di setiap Kab/Kota.
9. Evaluasi program-program pemberdayaan PMKS yang sudah ada di setiap Kab/Kota
10. Evaluasi jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS yang ada di setiap Kab/Kota.
11. Identifikasi usaha-usaha inovatif dan efektif dalam merehabilitasi, memberdayakan, menjamin dan melindungi PMKS di setiap Kabupaten/Kota.
12. Kajian tentang potensi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.
13. Kajian kelembagaan tentang kinerja dan kapasitas anggota Linmas dalam pelayanan publik.
14. Kajian kebutuhan mengenai jumlah dan kualifikasi PPNS untuk setiap Kabupaten/Kota
15. Kajian kelembagaan mengenai kinerja dan kapasitas partai politik dan politisi di setiap Kab/Kota.
16. Kajian tentang tingkat kepercayaan terhadap institusi-institusi dan pejabat-pejabat publik (TIG).
17. Kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pilegda di setiap Kab/Kota.
18. Kajian kelembagaan tentang kinerja dan kapasitas anggota DPRD sebagai legislator daerah.
19. Kajian kelembagaan mengenai kinerja dan kapasitas partai politik dan politisi di setiap Kab/Kota.
20. Kajian tentang tingkat kepercayaan terhadap institusi-institusi dan pejabat-pejabat publik (TIG).

21. Kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pilegda di setiap Kab/Kota.
22. Kajian kelembagaan tentang kinerja dan kapasitas anggota DPRD sebagai legislator daerah.
23. Eksplorasi persepsi masyarakat mengenai identitas ke-Indonesiaan dan kewarganegaraan yang berbudi luhur.

**Tabel 3.30.** Arah Kebijakan Riset Bidang Kesejahteraan Sosial

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Meningkatkan stabilitas tibumtransmas kesadaran politik dan hukum	Menata sistem hukum di daerah	Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah raperda yang di agendakan dalam prolegda	Penataan sistem hukum dan penegakan hukum	Kajian tentang isu publik yang bersifat kritis dan strategis di setiap Kabupaten/kota.
		Peningkatan penyelarasan peraturan daerah	Harmonisasi produk hukum provinsi dan harmonisasi produk hukum kabupaten/kota		Kajian ttg keselarasan produk hukum di setiap Kabupaten/Kota dengan hukum yang lebih tinggi.
		Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya	Jumlah penyelesaian perkara/sangketa perdata, pidana, TUN dan HAM secara litigasi dan non litigasi		Kajian kelembagaan ttg kinerja lembaga dan aparat penegakan hukum di setiap Kab/Kota.
Meningkatkan budaya taat hukum	Meningkatkan budaya taat hukum	Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan		Evaluasi tentang efektivitas sosialisasi produk hukum yang dilakukan di setiap Kab/Kota.
		Peningkatan pembinaan tibumtransmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya	Jumlah penegakan perundang-undangan daerah dan peraturan pelaksanaannya		Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat serta Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Infrastruktur Strategis
			Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan	1. Evaluasi basis data profile PMKS di setiap Kab/Kota. 2. Kajian perilaku tentang

				sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS	kemandirian PMKS dalam mengatasi masalah mereka. 3. Evaluasi program-program rehabilitasi PMKS yang sudah ada di setiap Kabupaten/Kota. 4. Evaluasi program-program pemberdayaan PMKS yang sudah ada di setiap Kabupaten/Kota. 5. Evaluasi jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS yang ada di setiap Kabupaten/Kota. 6. Identifikasi usaha-usaha inovatif dan efektif dalam merehabilitasi, memberdayakan, menjamin dan melindungi PMKS di setiap Kabupaten/Kota.
			Jumlah unjuk rasa ke tingkat provinsi		Kajian tentang potensi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.
			jumlah anggota Linmas per 100 penduduk		Kajian kelembagaan tentang kinerja dan kapasitas anggota Linmas dalam pelayanan publik.
		Peningkatkan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS se Jawa Barat	Jumlah anggota Pol PP per 10.000 penduduk dan jumlah PPNS Provinsi		Kajian kebutuhan mengenai jumlah dan kualifikasi Pol PP untuk setiap Kabupaten/Kota
			Jumlah PPNS Provinsi		Kajian kebutuhan mengenai jumlah dan kualifikasi PPNS untuk setiap Kabupaten/Kota
	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga negara	Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik	Jumlah penyelenggaraan fasilitasi pendidikan peran dan fungsi politik		Kajian kelembagaan mengenai kinerja dan kapasitas partai politik dan politisi di setiap Kab/Kota.



		Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik		Kajian tentang tingkat kepercayaan terhadap institusi-institusi dan pejabat-pejabat publik (TIG).
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu		Kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu pada dan pilegda di setiap Kab/Kota.
	Meningkatkan Kualitas Lemabaga Legislatif	Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan dprd	Jumlah PERDA yang disetujui		Kajian kelembagaan tentang kinerja dan kapasitas anggota DPRD sebagai legislator daerah.
			Jumlah PERDA inisiatif		
			Jumlah rapat kerja inisiatif dewan		
	Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBN		Eksplorasi persepsi masyarakat tentang ke-Indonesiaan dan kewarganegaraan yang berbudi luhur.

### 3.8.1.3. Tema Riset

Ke-23 arah kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori arah kebijakan dan sekaligus menjadi prioritas utama pada tahun 2016-2028). Keempat kategori dan prioritas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. **Eksplorasi;** yaitu arah kebijakan riset yang bertujuan untuk menemukenali hal-hal baru yang bersifat inovatif dan kreatif, baik secara teoritik maupun empirik mengenai masalah yang belum diteliti sebelumnya, namun merupakan masalah strategis dan kritis bagi kehidupan bersama di Jawa Barat. Tema penelitian yang menjadi prioritas utama dalam kategori ini adalah:

- Eksplorasi tentang konsep diri dan identitas masyarakat Jawa Barat.
  - Eksplorasi tentang konsep ke-Indonesia-an dan kewarganegaraan yang berbudi luhur (*virtuousness*) masyarakat Jawa Barat.
  - Eksplorasi tentang konsep kewarga-duniaan (*global citizenship*) masyarakat Jawa Barat.
- b. **Identifikasi;** yaitu arah kebijakan riset yang bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah yang secara konseptual teoritik telah terumuskan dengan baik, namun membutuhkan konfirmasi empirik tentang keberlakuannya dalam konteks tertentu. Tema prioritas untuk tahun 2016-2018 adalah:
- Identifikasi tingkat ketahanan sosial masyarakat Jawa Barat dalam menghadapi tantangan, baik yang datang dari dalam berupa memudarnya identitas diri, maupun dari luar berupa masifnya arus globalisasi ekonomi.
  - Identifikasi isu-isu publik strategis dan kritis yang perlu diantisipasi dan atau direspon melalui perumusan dan implementasi kebijakan publik di setiap Kabupaten/Kota.
  - Identifikasi potensi-potensi konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah sebagai akibat dari perbedaan kebutuhan (*needs*), kepentingan (*interests*) dan pusat perhatian (*concerns*) yang berbeda.
- c. **Kajian;** yaitu arah kebijakan riset yang bertujuan untuk membuat deskripsi maupun eksplanasi mengenai masalah yang, baik secara konseptual teoritik maupun fenomenal empirik sudah relatif mapan dan terukur. Tema prioritas untuk tahun 2016-2018 adalah:
- Kajian kelembagaan tentang kinerja lembaga dan aparat penegakan hukum di setiap Kab/Kota.
  - Kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pilegda di setiap Kab/Kota.
  - Kajian kelembagaan tentang kinerja dan kapasitas anggota DPRD sebagai legislator daerah.

- Kajian kelembagaan mengenai kinerja dan kapasitas partai politik dan politisi di setiap Kab/Kota.
  - Kajian mengenai tingkat kemandirian (*self-help*) masyarakat Jawa Barat dalam memahami, mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mencari solusi yang efektif dan inovatif untuk menyelesaikannya.
- d. **Monitoring dan Evaluasi**; yaitu arah kebijakan riset yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program-program yang sedang atau sudah dilaksanakan. Tema prioritas untuk tahun 2016-2018 adalah:
- Evaluasi program-program rehabilitasi PMKS yang sudah ada di setiap Kab/Kota.
  - Evaluasi program-program pemberdayaan PMKS yang sudah ada di setiap Kab/Kota
  - Evaluasi jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS yang ada di setiap Kab/Kota.
  - Evaluasi integrasi dan pelaksanaan *social safeguard* dalam pemangunan infrastruktur di Jawa Barat.

#### 3.9.1.4. Tema Riset Unggulan

**Tabel 3.31.** Tema Riset Unggulan  
Identitas Sosial Masyarakat Jawa Barat

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Eksplorasi tentang konsep diri dan identitas sosial masyarakat Jawa Barat.	Rumusan tentang konsep diri dan identitas lokal masyarakat Jawa Barat. Rumusan tentang konsep ke-Indonesia-an dan kewarganegaraan yang berbudi luhur (virtuousness) masyarakat Jawa Barat. Rumusan tentang konsep kewarga-duniaan (global citizenship) masyarakat Jawa Barat.	Jelasnya identitas sosial masyarakat Jawa Barat di tangan identitas nasional dan internasional	BP3Iptek, Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi bereputasi

**Tabel 3.32.** Tema Riset Unggulan  
Isu Publik Strategis dan Konflik Sosial

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Identifikasi isu-isu	Teridentifikasinya isu-isu publik strategis dan kritis	Jumlah gangguan	BP3Iptek,

publik strategis dan potensi konflik sosial vertikal antara masyarakat dan pemerintah daerah.	yang perlu diantisipasi dan atau direspon melalui perumusan dan implementasi kebijakan publik di setiap Kabupaten/ Kota. Teridentifikasi potensi-potensi konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah sebagai akibat dari perbedaan kebutuhan (needs), kepentingan (interests) dan pusat perhatian (concerns) yang berbeda.	ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi bereputasi
---	---	--	---

**Tabel 3.33. Tema Riset Unggulan  
Kinerja Lembaga Publik dan Kemandirian Masyarakat**

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Kajian kritis tentang kinerja lembaga publik dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial secara kolektif.	Rumusan tentang kinerja dan kapasitas anggota DPRD sebagai legislator daerah. Rumusan tentang kinerja partai politik dan kapasitas politisi di setiap Kab/Kota. Rumusan tentang tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam pemilukada dan pilegda di setiap Kab/Kota. Rumusan tentang tingkat kemandirian (self-help) masyarakat Jawa Barat dalam mencari solusi yang efektif dan inovatif bagi masalah kolektif yang mereka hadapi	Jumlah PERDA yang disetujui Jumlah produk hukum yang disosialisasikan Jumlah PERDA inisiatif Jumlah rapat kerja inisiatif dewan Jumlah penyelenggara-an fasilitasi pendidikan peran dan fungsi politik Jumlah penyelenggaraan fasilitasi pendidikan peran dan fungsi politik. Jumlah penyelenggara-an fasilitasi pendidikan peran dan fungsi politik	Pusat Penelitian di Lingkungan DPRD, Parpol, dan Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi bereputasi

**Tabel 3.34. Tema Riset Unggulan  
Pembangunan Fisik dan Sosial Safeguard**

NO	TOPIK	TARGET TAHUN 2018	INDIKATOR KEBERHASILAN 2018	OPD TERKAIT
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan social safeguard dalam setiap pembangunan infrastuktur fisik, serta evaluasi program-program untuk PMKS di setiap Kabupaten/Kota.	Rekomendasi tentang pengintegrasian social safeguard dalam pemangunan infrastruktur fisik di Jawa Barat, pembangunan waduk Jati Gede, rehabilitasi Saluran Tarum Barat, pembangunan jalan tol Cisumdawu dan Bandar Udara. Rekomendasi mengenai perbaikan program-program rehabilitasi sosial PMKS yang akan dilaksanakan di setiap Kab/Kota. Rekomendasi mengenai program-program pemberdayaan PMKS yang akan dilaksanakan di setiap Kab/Kota. Rekomendasi bagi penyelenggara-an jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS yang ada di setiap Kab/Kota.	Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Pusat Penelitian di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial dan Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi bereputasi.

### **3.9.2. Bidang Keamanan**

#### **3.9.2.1. Latar Belakang**

Keamanan di Jawa Barat sangat erat terkait dengan pembangunan hukum, yang seharusnya diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk di dalamnya pembangunan aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Salah satu bentuk pengembangan hukum yang perlu dikembangkan adalah penyusunan program legislasi daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah, serta menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah; dan menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pembangunan hukum daerah dan peraturan perundang-undangan daerah diarahkan kepada upaya mewujudkan peraturan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan sarana untuk melakukan pembangunan, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan materi peraturan perundangan-undangan daerah dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama dan kepentingan masyarakat luas serta dapat menjamin terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia dan hirarkhi peraturan perundangan-undangan baik vertikal maupun horizontal. Pemantapan kelembagaan hukum daerah, meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi

hukum dalam mendukung kelembagaan hukum pusat agar lebih mampu mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia, dan hirakhi peraturan perundangan-undangan serta asas–asas hukum universal. Penerapan dan penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah hukum dan menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dilakukan dengan : (a) menyederhanakan syarat dan prosedur dalam penerbitan berbagai perizinan; (b) melakukan deregulasi berbagai bidang; dan (c) memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang mampu. Sedangkan pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan secara terencana yang disusun dalam program legislasi daerah (Prolegda). Pengembangan budaya hukum sehingga tercipta ketaatan dan penghormatan masyarakat dan aparat pemerintah terhadap hukum dilakukan dengan melakukan : (a) penyuluhan hukum secara intensif, mengembangkan nilai-nilai hukum adat; (b) keteladanan tokoh panutan; (c) penerapan dan pelayanan hukum secara adil; (c) dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horizontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah diberbagai bidang pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada terwujudnya kondisi yang aman, tertib dan tentram, serta tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah. Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui penataan sistem keamanan yang handal, peningkatan kualitas aparat

keamanan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penataan sistem keamanan dan ketertiban dilakukan dalam rangka membangun sistem keamanan terpadu yang berbasis masyarakat dengan membangun koordinasi dan kerjasama secara sinergis antara masyarakat, satuan linmas, polisi pamong praja, dan kepolisian sebagai inti. Peningkatan kualitas aparat keamanan dan ketertiban dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional dan pemantapan kualitas moral dan etika, serta meningkatkan budaya disiplin disertai dengan peningkatan kesejahteraan.

*Peran aktif masyarakat haruslah dibina dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat tercapai dengan baik, hal ini dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang efektif antara aparat keamanan dan masyarakat; Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat; peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya kondisi aman, tertib dan tentram ditandai dengan kriteria berikut ini: 1). Membaiknya kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang tercermin dari meningkatnya kualitas layanan terhadap korban; semakin efektifnya penanganan kejahatan dan pelanggaran serta menurunnya kejahatan dan pelanggaran. 2). Tertatanya sistem keamanan yang handal, meningkatnya profesionalisme dan etika aparat keamanan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.*

Selain penyediaan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyelarasan peraturan daerah, kebijakan Provinsi Jawa Barat dalam bidang keamanan adalah terkait dengan:

1. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;
2. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan baik tingkat pusat maupun produk hukum daerah;
3. Peningkatkan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;

4. Peningkatkan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS se-Jawa Barat;
5. Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik;
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik;
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu;
8. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD; dan
9. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara.

### 3.9.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Utama

Arah kebijakan dan prioritas utama bidang keamanan dan hukum dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.35.** Arah Kebijakan Riset Bidang Keamanan Dan Hukum

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Meningkatkan stabilitas tibumtransmas kesadaran politik dan hukum	Menata sistem hukum di daerah	Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah raperda yang di agendakan dalam prolegda	Disesuaikan dengan kebutuhan daerah.	Menghasilkan produk hukum daerah yang integratif dan partisipatif.
		Peningkatan penyelarasan peraturan daerah	Harmonisasi produk hukum provinsi dan harmonisasi produk hukum kabupaten/kota	Substansi/Materi Muatan yang sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan.	Harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
		Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya	Jumlah penyelesaian perkara/sengketa Perdata, Pidana, TUN dan HAM secara litigasi dan non litigasi	Koordinasi dan Publikasi	Keterbukaan Informasi Publik
Meningkatkan budaya taat hukum		Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	Peran serta masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
	Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan	Peningkatan pembinaan tibumtransmas, satuan perlindungan masyarakat dan	Jumlah penegakan perundang-undangan daerah dan peraturan pelaksanaannya	Rekrutmen Aparat Penegak Hukum Daerah	SDM Terlatih/ Profesional Monitoring Penegakan Hukum.



	ketentraman masyarakat	unsur rakyat terlatih lainnya	Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
			Jumlah unjuk rasa ke tingkat provinsi	Koordinasi dengan aparat kewilayahan	Evaluasi Pengamanan dan Penanganan Unjuk Rasa
			jumlah anggota Linmas per 100 penduduk	Penempatan sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan	Laporan Kondisi dan situasi masyarakat.
		Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS se Jawa Barat	Jumlah anggota Pol PP per 10.000 penduduk dan jumlah PPNS Provinsi	Pemenuhan Rasio	Pendidikan dan Pelatihan
			Jumlah PPNS Provinsi	Proposional	Penganggaran Dana Operasional
	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga negara	Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik	Jumlah penyelenggaraan fasilitasi pendidikan peran dan fungsi politik	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Memorandum of Understanding
		Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik	Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum	Berkesinambungan dan berkelanjutan
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu	Tingkat Partispasi masyarakat dalam pemilu	Lokasi yang terjangkau	Penataan lokasi Pemilu
	Meningkatkan Kualitas Lembaga Legislatif	Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan dprd	Jumlah PERDA yang disetujui	Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda)	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah
			Jumlah PERDA inisiatif	Penyesuaian dengan Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah	Penataan Organisasi Perangkat Daerah
			Jumlah rapat kerja inisiatif dewan	Melibatkan Leading Sektor terkait.	Kesepakatan Bersama
	Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBN	Pendidikan Politik Masyarakat	Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan

### 3.9.2.3 Tema Riset

Berdasarkan Bidang Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Hukum yang terurai dalam 23 arah kebijakan yang diturunkan dari matriks Arah Kebijakan Riset Provinsi Jawa Barat berdasarkan RPJMD 2013-2018 yang telah diuraikan di atas, maka tema riset dalam meningkatkan stabilitas tibumtransmas, kesadaran politik dan hukum dapat terrinci sebagai berikut :

1. Riset terhadap isu-isu publik strategis dan kritis yang perlu diantisipasi melalui perumusan dan implementasi kebijakan dan/atau melalui peraturan produk hukum daerah di setiap Kabupaten dan Kota.
2. Riset terhadap potensi-potensi konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah sebagai akibat dari perbedaan kebutuhan (*needs*) dan kepentingan (*interests*) yang berbeda guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik warga negara.
3. Riset terhadap kelembagaan tentang kinerja lembaga dan aparat penegakan hukum di setiap Kabupaten dan Kota.
4. Riset terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kepala Daerah dan Pemilu Anggota Legislatif Daerah di setiap Kabupaten dan Kota.
5. Riset terhadap kinerja kelembagaan dan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Legislator Daerah.
6. Riset terhadap kelembagaan mengenai kinerja dan kapasitas Partai Politik dan politisi di setiap Kabupaten dan Kota.
7. Riset terhadap pementapan pemahaman semangat kebangsaan dan bernegara guna menunjang stabilitas keamanan di setiap daerah Kabupaten dan Kota.

## 3.10. Pemerintahan

### 3.10.1. Latar Belakang

Gambaran mengenai buruknya pelayanan publik menjadi opini buruk bahkan citra negatif di dalam masyarakat, karena pelayanan yang diberikan sangat tidak memuaskan dan cenderung rumit. Opini tersebut muncul, karena birokrasi pada sektor publik bekerja dalam koridor institusi dan hukum yang kaku dan lemah serta cenderung menghalangi efisiensi yang sulit merespon tuntutan publik, sehingga birokrasi publik bersikap terlalu formal dan bergantung pada aturan

tertulis. Sikap mental ekstrim tersebut, sering disebut dengan terminologi “*red tape*”, hal itu mengemuka karena adanya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik dan tradisi yang telah mengakar dalam lingkaran birokrasi publik. Menurut Cohen, et.al. terjemahan Wijaya dan Pakpahan (2011: 20) menyatakan bahwa:

*Red tape dalam beberapa proses rutin dapat menyebabkan terjadinya praktek-praktek manajemen yang tak efektif dan mahal yang menimbulkan terjadinya citra manajemen publik yang sangat negatif di media massa.*

Pandangan tersebut, telah tertanam dalam masyarakat, karena masyarakat memiliki kepentingan besar terhadap tugas aparatur, sehingga dapat diopinionkan bahwa aparatur bekerja dalam pengawasan yang ketat. Kondisi tersebut tercermin dalam sebuah contoh kecil, jika aparatur melakukan pengadaan barang dan jasa cenderung mengabaikan prosedur, sehingga dengan mudah masyarakat berasumsi telah terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugas. Bila pelaksanaan prosedur formal pengadaan barang dan jasa tersebut terdapat kekeliruan dan salah urus, maka akan terjadi penundaan secara besar-besaran. Namun dengan adanya pengawasan yang ketat dalam implementasi kebijakan, maka dengan mudah pula citra pelayanan publik tercemar bahwa telah terjadi kegagalan dalam melaksanakan tugas.

Faktor lain yang telah tertanam di masyarakat terhadap citra birokrasi, yaitu sering berbuat salah dan tidak terampil dalam mengambil keputusan dan melepaskan tanggungjawab kepada pihak lain serta bersembunyi dibalik keputusan-keputusan yang samar-samar dan abu-abu dengan menggunakan bahasa yang berliku dan terjal. Seharusnya dalam mengambil keputusan manajer publik dapat membuka diri untuk menerima kritik dari otoritas internal publik, sehingga rasa khawatir untuk mengambil keputusan tidak mencerminkan budaya sektor publik yang beropini negatif. Bentuk upaya untuk mengatasi citra buruk sektor publik perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan cara melakukan kompetensi, baik secara individual maupun organisasional, agar pelayanan publik dapat bekerja mandiri dan taat serta berorientasi pada sikap profesionalisme birokrasi.

Kompetensi dimaksud merupakan segi penting yang perlu dimiliki oleh segenap pejabat dan aparatur publik guna terciptanya kemampuan kerja yang berkualitas sesuai dengan mutu yang distandarisasi, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional. Boyatzis dalam Sudarmanto (2009: 45) menyatakan bahwa: “Kompetensi dimaksud adalah karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kinerja unggul dan efektif di dalam pekerjaan”. Atas dasar pemahaman tersebut, maka aparatur yang memiliki karakteristik kerja yang unggul, mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang menuntut kemampuan diri dan kualitas kerja yang diharapkan untuk mengembangkan diri agar dapat bekerja secara total menuju profesionalisme birokrasi yang handal dan terpercaya.

### **3.10.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama**

Arah kebijakan dan prioritas utama bidang Tata Kelola Pemerintahan yaitu :

1. Lemahnya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah.
2. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*.
3. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur.
4. Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat.
5. Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.
6. Terbatasnya Sarana dan Prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki masih belum memadai dalam memperlancar pelayanan publik

**Tabel 3.36.** Arah Kebijakan Riset Bidang Pemerintahan

Misi Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Tematik Sektoral	Arah Kebijakan Riset
Meningkatkannya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	Penataan struktur organisasi yang profesional	Presentase besaran organisasi perangkat daerah provinsi yang tepat ukur dan tepat fungsi		(1) Memiliki struktur organisasi yang ramping tetapi kaya akan fungsi dalam implementasi tugasnya. (2) Aparatur yang dimiliki sangat profesional baik secara keilmuan maupun dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintah.
		Peningkatan pelayanan administrasi organisasi	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD/Balai/UPT/UP TD dalam mendukung tugas		(1) Orientasi kerja aparatur pada basis kinerja yang efektif, efisien dan produktivitas. (2) Sikap mental dan perilaku aparatur yang ramah dan melayani serta memenuhi kebutuhan publik.
		Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah	Jumlah regulasi penegasan batas daerah		Adanya batas wilayah administrasi yang jelas dan legal.
		Percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik serta Pembangunan Sarana Peribadatan Bersifat Monumental	(1) Partisipasi pelayanan publik yang didasari keterlibatan mental dan fisik dari aparatur. (2) Mengoptimalkan peran kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten dan kota sebagai lembaga pelayanan masyarakat.
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan zona integritas	Jumlah OPD yang menerapkan zona integritas	Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur yang diakui Badan Survey Nasional dan Internasional	(1) Terciptanya aparatur yang transparan dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan tugasnya. (2) Mengembangkan

				serta Modernisasi Tatakelola Pemerintahan	zona integrasi sebagai upaya pemerataan pembangunan/pelayanan publik. (3) Pengembangan daerah kabupaten/kota sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat terpencil.
		Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan, tingkat ketersediaan pusat arsip OPD, tingkat pengamanan arsip vital/arsip aset pemda		(1) Peningkatan arsip daerah yang memuat arsip lengkap, legal dan asli. (2) Electronic library sebagai daya dukung bagi kemudahan pengarsipan dan mencari arsip yang dibutuhkan. (3) Memiliki arsip yang melindungi aset-aset provinsi dan aset-aset kabupaten/kota.
		Pengaturan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Penataan sistem hukum dan penegakan hukum	Administrasi keuangan daerah yang bertanggung jawab dan transparan pada publik
		Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD/Balai/UPT/UP TD		Pemberian Otonomi keuangan secara penuh berdasarkan pada kewenangan dan tugasnya.
			Tingkat ketersediaan dokumen operasional		Sistem pelaporan keuangan aparaturnya daerah yang efektif, efisien dan mudah dilaksanakan.
		Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Jawa	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran		(1) Pelaksanaan pelayanan publik yang memberikan kepuasan pada masyarakat. (2) Pelaporan keuangan yang tepat waktu dan periodisasi.

		Barat			
		Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi	Tingkat pendapatan daerah		Menciptakan dan menentukan PADS yang belum tergalai selama ini, baik di daratan maupun di lautan.
		Mewujudkan tertib administrasi pertanahan	Presentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah pemprov		(1) Pencatatan hak milik tanah dan bangunan berdasarkan regulasi tata ruang. (2) Pemilikan sertifikasi tanah bagi para pemilik tanah, supaya tak terjadi pemilikan ganda.
		Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah presentase aset yg diamankan		Adanya koordinasi vertikal antara instansi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara teratur.
		Peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian sistem pemerintahan(SPI)	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP		Penciptaan sistem pengendalian pengawasan yang tepat sasaran dan mudah dijalankan.
		Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tatakelola dan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah	Presentase pemanfaatan dan tindak lanjut pengawasan intern		Peningkatan pengawasan dan pengembangan aparatur yang berbasis kinerja.
		Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Presentase akurasi data kependudukan		Peningkatan administrasi kependudukan dan administrasi catatan sipil.

	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar daerah		Mengelola sarana dan prasarana administrasi daerah untuk mendukung kinerja aparatur daerah.
			Presentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UP TD yang terpelihara		Pemilikan fasilitas rapat OPD/Balai dan unit kerja lainnya.
	Meningkatkan kerjasama pembangunan	Peningkatan kerjasama kemitraan strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat dan kabupaten/kota	Jumlah kerjasama antar daerah kabupaten/kota antar provinsi dan luar negeri	Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak	Penciptaan Kerjasama antar instansi melalui aktivitas studi banding antar kelembagaan.
		Peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama jawa barat melalui alinasi strategis multi pihak dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi BUMN/BUMD, swasta, LSM, dalam negeri dan luar negeri		Penciptaan kerjasama antara instansi pemerintah dan instansi swasta.
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi dan tingkat penanganan dan pengelolaan kewilayahan		Sistem evaluasi administrasi pembangunan daerah bagi peningkatan kualitas kerja aparatur.
		Peningkatan kualitas perencanaan daerah	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan dan Pelaporan yang terpercaya dan diakui oleh Lembaga Audit Skala Nasional	Perencanaan pengendalian pada berbagai sektor yang memiliki kualitas prima.



			Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota		Adanya keseimbangan perencanaan antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
			Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan		Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam implementasi perencanaan.
		Peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah	Hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan		Riset perencanaan daerah dan pembangunan daerah sesuai harapan publik.
	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	Peningkatan pengelolaan satu data pembangunan	Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah		Model-model tata kelola pembangunan daerah berdasarkan model kuantitatif.
	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat	Peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa	Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa		Peningkatan wawasan aparatur desa dan pemenuhan sarana prasarana desa.
		Peningkatan pembinaan bagi aparat desa dan kelurahan	Presentase desa dan kelurahan berpresentase terhadap total desa dan kelurahan		Pembinaan dan peningkatan keterampilan aparatur desa dan penataan desa.
			Tingkat perkembangan desa		
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan & meningkatkan strata posyandu multifungsi		Mengukur kinerja kelembagaan dan partisipasi pembangunan masyarakat desa
		Meningkatkan infrastruktur perdesaan	Tingkat ketersediaan infrastruktur perdesaan		Riset penciptaan desa pariwisata, desa pertanian, desa perkebunan dan desa tradisional.

	Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan informasi	pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan	Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak	(1) Aplikasi teknologi informasi desa dan E-Government pedesaan. (2) Tata guna teknologi informasi desa tertinggal/desa tradisional.
		peningkatkan penggunaan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province	Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik serta Pembangunan Sarana Peribadatan Bersifat Monumental	E-Government System (Tata kelola Jaringan internet).
			Indeks teknologi komunikasi (TIK) dan jumlah penduduk melek TIK		Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) pedesaan.
			Layanan melalui situs website resmi pemerintahan provinsi Jawa Barat		
			Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfo	Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan, Optimalisasi Peran UPTD dan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur informasi komunikasi melalui: - ijin penyiaran - kualitas siaran - kualitas pegawai penyiaran.
			Rasio perijinan lembaga penyiaran		
			Status mutu isi siaran lembaga penyiaran		
			Jumlah peserta pengembangan SDM penyiaran		
			Jumlah masyarakat peserta sosialisasi melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media	Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan, Optimalisasi Peran UPTD dan Infrastruktur Perdesaan	Peningkatan peluasan Media TV, Radio dan media surat kabar.

	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan daerah	Peningkatan pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi	Presentase pegawai yang mencapai SKP diatas 70%	(1)Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur yang diakui Badan Survey Nasional dan Internasional serta Modernisasi Tatakelola Pemerintahan. (2)Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik serta Pembangunan Sarana Peribadatan Bersifat Monumental	Peningkatan kompetensi manajerial aparatur melalui pelatihan dan pendidikan.
			Presentase pegawai yang memiliki min1 sertifikat kompetensi		Peningkatan keterampilan aparatur daerah dalam melaksanakan tata kelola tugas.
		Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja	Presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah		Pemilikan fasilitas kerja aparatur daerah yang memadai dan modern.

### 3.10.3. Tema Riset

Tema riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan tahun 2016-2018 adalah Jawa Barat yang memiliki aparatur berkualitas dan profesional yang berbasis kinerja menuju revitalisasi pelayanan publik.

### 3.10.4. Tema Riset Unggulan

1. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Publik
2. Profesionalisme Birokrasi Berbasis Kinerja
3. Revitalisasi Pelayanan Publik

**Tabel 3.37.** Tema Riset Unggulan

## Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Publik

No.	Topik	Target Tahun 2018	Indikator Keberhasilan 2018	OPD Terkait
<b>Sub Tema: Penguasaan Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tanggungjawab Aparatur</b>				
1	Peningkatan aktivitas dan pelayanan yang sesuai aturan dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.	Rekomendasi sarana prasarana dan fasilitas kerja yang memadai. Rekomendasi penyediaan teknologi kerja perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Rekomendasi kebijakan peningkatan keterampilan aparatur yang tersedia. Rekomendasi pengembangan infrastruktur pendukung kerja aparatur.	Peningkatan keterampilan aparatur.  Peningkatan hasil kerja pada program yang telah ditentukan.  Pengurangan kesalahan dalam melaksanakan tugas-tugas rutin. Teratasinya berbagai kendala yang dihadapi dalam tugas.	Semua OPD
2	Menata lingkungan strategis yang senantiasa berubah.	Rekomendasi penataan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Rekomendasi sosialisasi mengenai perubahan aturan dari aturan lama ke aturan baru. Rekomendasi tentang perubahan tata kelola perbaikan lingkungan strategis.	Peningkatan lingkungan kerja yang kondusif. Terselenggaranya sosialisasi mengenai perubahan aturan.  Adanya tata kelola kerja yang efektif dan efisien.	Semua OPD
3	Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Rekomendasi tentang kebijakan penanganan situasi keamanan institusi. Rekomendasi tentang tim atau kelompok kerja untuk mengatasi ketidakpuasan menuju pada tingkat kepastian pelayanan. Rekomendasi tentang tugas dan fungsi aparatur serta SOP berkaitan dengan penanganan masalah dalam masyarakat.	Terjadinya ketertiban untuk mendukung sistem kerja institusi. Terbentuknya tim kerja guna mendukung pelayanan publik. Berhasilnya pelayanan dalam menangani masalah yang terjadi di dalam masyarakat dengan peta SOP.	Semua OPD

**Tabel 3.37. Tema Riset Unggulan  
Profesionalisme Birokrasi Berbasis Kinerja**

No.	Topik	Target Tahun 2018	Indikator Keberhasilan 2018	OPD Terkait
<b>Sub Tema: Aplikasi Good Governance dari Sentralisasi ke Desentralisasi</b>				
1	Aplikasi kinerja aparatur menuju perbaikan hasil kerja yang optimal.	Rekomendasi dukungan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Rekomendasi peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. Rekomendasi target dan sasaran kerja yang harus dicapai aparatur.	Memiliki teknologi untuk mendukung pekerjaan aparatur. Memiliki aparatur yang terampil dalam tugas dan mudah memahami pekerjaan. Adanya tingkat keberhasilan kerja yang optimal pada institusi.	Semua OPD
2	Menciptakan kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga lain (LSM, Perusahaan dan Perguruan Tinggi).	Rekomendasi untuk bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di lingkungan institusi. Rekomendasi melibatkan pihak luar untuk memberi daya dukung hasil kerja. Rekomendasi optimalisasi kerja dengan menentukan target pekerjaan kepada seluruh aparatur.	Menciptakan kerjasama antara instansi pemerintahan dengan pihak luar. Adanya jalinan kerjasama rutin antara instansi pemerintah dengan instansi terkait. Peningkatan hasil kerja yang dilakukan aparatur terhadap tugas yang diberikan.	Semua OPD
3	Pergeseran pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi.	Rekomendasi tentang pemekaran daerah dalam proses percepatan pembangunan. Rekomendasi tentang penguatan	Adanya pemekaran daerah guna percepatan pembangunan daerah. Terjadinya partisipasi masyarakat karena keterlibatan dalam	Semua OPD

		pemahaman yang terjadi di dalam masyarakat karena terjadinya dinamika perubahan. Rekomendasi tentang hak dan kewajiban aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.	berbagai kegiatan. Munculnya aparatur yang berorientasi berpikir tidak sistemik ke berpikir sistemik.	
--	--	---	---	--

**Tabel 3.38.** Tema Riset Unggulan Revitalisasi Pelayanan Publik

No.	Topik	Target Tahun 2018	Indikator Keberhasilan 2018	OPD Terkait
Sub Tema: Menuju Pola Kerja yang Dinamis, Realistis dan Dialogis				
1	Membangun kompetensi aparatur guna merubah posisi dan peran aparatur.	Rekomendasi tentang perlunya peningkatan keterampilan aparatur pemerintah. Rekomendasi tentang pola tata kerja dan disiplin aparatur dalam peningkatan kinerja. Rekomendasi tentang pola kerja sloganis/jargon menuju pola kerja realistis dinamis.	Mendapatkan aparatur yang terampil bekerja dan kreatif dalam melaksanakan tugas. Adanya aparatur yang memahami pola kerja dari orientasi kuantitas ke orientasi kualitas. Menghasilkan aparatur yang bekerja lambat ke aparatur yang bekerja efektif.	Semua OPD
2	Perubahan perilaku aparatur dari pendekatan kekuasaan ke arah fleksibel kolaboratis.	Rekomendasi tentang perubahan perilaku aparatur melalui peningkatan wawasan berpikir. Rekomendasi tentang perlunya pendekatan yang lebih demokratis kepada masyarakat. Rekomendasi tentang perubahan sikap dari pola kerja statis ke pola kerja dinamis.	Munculnya perubahan perilaku aparatur yang memiliki wawasan luas. Lahirnya aparatur yang bersikap terbuka dan melayani masyarakat dengan penuh kesadaran dan etika yang kuat. Memiliki aparatur yang bersikap dinamis dan percepatan dalam melaksanakan tugas.	Semua OPD
3	Pelayanan publik yang berperan sebagai penyelia layanan kepada masyarakat.	Rekomendasi tentang larangan praktek budaya paternalistik yang berakibat menurunnya pelayanan publik. Rekomendasi tentang larangan pemberian keistimewaan kepada elit birokrat. Rekomendasi tentang perlunya netralitas birokrasi terhadap elit kekuasaan.	Hilangnya budaya paternalistik dan munculnya budaya kerja egaliter. Membiasakan bersikap santun pada atasan tetapi tidak mengkultuskannya. Munculnya birokrat bersikap lambat dalam hubungan kerja dengan para elit kekuasaan.	Semua OPD

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Jl. Citarum No. 8 Bandung - Indonesia  
Telp/ Fax : (022) 87244652/ (022) 7272919  
Email : [bp3iptek.jabar@gmail.com](mailto:bp3iptek.jabar@gmail.com)  
Website : [www.bp3iptek.jabarprov.go.id](http://www.bp3iptek.jabarprov.go.id)

